

**PROFITABILITAS *LINKAGE PROGRAM* AKAD
MUDHARABAH LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
(LKMS) DENGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS)
(Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan
BRI Syariah Cabang Semarang)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Ekonomi Syariah



oleh:

FAIQOTUN NI'MAH
(1600108010)

Konsentrasi: Manajemen dan Bisnis

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : **Faiqotun Ni'mah**
NIM : 1600108010
Judul Penelitian : **Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage* Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) (Studi Kasus Pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)**
Program Studi : Ekonomi Syariah
Konsentrasi : Manajemen dan Bisnis

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

PROFITABILITAS AKAD MUDHARABAH *LINKAGE* PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DENGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS) (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 17 Oktober 2019
Pembuat Pernyataan,


Faiqotun Ni'mah
NIM: 1600108010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185

FTM-20A

**PENGESAHAN PERBAIKAN TESIS
OLEH MAJELIS PENGUJI UJIAN TESIS**

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa tesis saudara:

Nama : **Faiqotun Ni'mah**
NIM : **1600108010**
Prodi : **EKONOMI SYARIAH**
Konsentrasi : **BISNIS DAN MANAJEMEN SYARIAH**
Judul : **PROFITABILITAS LINKAGE PROGRAM AKAD MUDHARABAH LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DENGAN BANK UMUM SYARIAH
(BUS) (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan
BRI Syariah Cabang Semarang)**

telah dilakukan perbaikan sesuai dengan saran yang diberikan penguji pada saat Ujian Tesis yang telah dilaksanakan pada 21 November 2019 dan layak dijadikan syarat memperoleh gelar Magister dalam bidang Ekonomi Syariah.

NAMA

TANGGAL

TANDATANGAN

Dr. Ratno Agriyanto, M.Si
Ketua/Penguji

7/1 2020

Dr. A. Turmudi, M.Ag
Sekretaris/Penguji

2/1 2020

Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
Pembimbing/Penguji

8/1 2020

Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag
Pembimbing/penguji

8/1 2020

Dr. Ali Murtadho, M.Ag
Penguji

7/1 2020

Prof. Dr. Mujiyono, MA
Penguji

7/1 2020

NOTA DINAS

Semarang, 17 Oktober 2019

Kepada

Yth. Dekan FEBI

UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Faiqotun Ni'mah**

NIM : 1600108010

Konsentrasi : Manajemen dan Bisnis

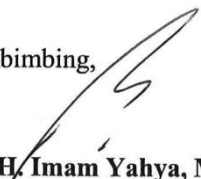
Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : **Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage* Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wa'alaikumsalam wr.wb

Pembimbing,


Dr. H. Imam Yahya, M.Ag
NIP.197004101995031001

NOTA DINAS

Semarang, 17 Oktober 2019

Kepada

Yth. Dekan FEBI

UIN Walisongo

Semarang

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Faiqotun Ni'mah**

NIM : 1600108010

Konsentrasi : Manajemen dan Bisnis

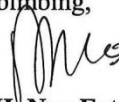
Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul : **Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage* Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wa'alaikumsalam wr.wb

Pembimbing,



Dr. H. Nur Fatoni, M.Ag

NIP.197308112000031004

MOTTO

“Perusahaan yang baik laksana pohon yang akarnya kuat, daunnya rindang, dan buahnya lebat.”

By:

Prof. Dr. Mujiyono Abdillah, M.A

ABSTRAK

Judul : Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage Program* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)

Penulis : Faiqotun Ni'mah

NIM : 1600108010

Setiap kegiatan usaha pada lembaga termasuk lembaga keuangan tentu memikirkan aspek keuntungan atau profit. Akad mudharabah *linkage program* menjadi hal yang menarik untuk dikaji karena sangat diminati lembaga keuangan maupun koperasi dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu, pemerintah pro akan hal itu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 karena program ini ditujukan untuk mendanai UKM (*end user*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Semua data diolah dengan alur analisis reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) BMT BUS Lasem menjadi *mudharib* dari lima bank umum syariah dan dua lembaga pemerintah. Di sisi lain, BMT BUS menggunakan akad mudharabah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah (*end user*). BRI Syariah cabang Semarang bersama BMT BUS Lasem menjalankan *linkage program* mudharabah sesuai ketentuan akad mudharabah yang ditetapkan pemerintah. (2) Profitabilitas akad mudharabah *linkage program* pada BMT BUS sangat baik, akad mudharabah menjadi \program unggulannya. Dana yang ia dapatkan dari *linkage program* akad mudharabah dengan beberapa bank umum syariah termasuk BRI Syariah mampu meningkatkan keuntungan/profit lembaganya. Sedangkan pada BRI Syariah, profitabilitas atau keuntungan tidak mengalami peningkatan karena penggunaan akad mudharabah *linkage program* dengan lembaga keuangan mikro syariah.

Kata kunci: linkage program, mudharabah, dana, profit, lembaga.

ABSTRACT

Title : **Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage Program* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)**

Author : Faiqotun Ni'mah

NIM : 1600108010

Every business activity in establishments include finance establishment certainly think about the aspect of profit. The mudharabah linkage program is an interesting thing to study because it is in great demand of finance establishments and cooperatives to do their business activities and the government is pro to that by issue the Minister of Cooperative and Small and Medium Enterprise Republic of Indonesia Number. 03/Per/M.KUKM/ III/2009 because this program is intended to fund UKM (end users). This research is a qualitative research. The author chose the field research method in this research. The data was obtained by interview, observation and documentation. All data are processed by analysis flow are data reduction, data presentation, and make conclusion/ verification.

This research explains that (1) BMT BUS became mudharib of five sharia commercial banks and two government establishments. Beside that, BMT BUS uses mudharabah contract in financing customers (end users). BRI Syariah Semarang branch together with BMT BUS Lasem runs a mudharabah linkage program in accordance with the mudharabah contract stipulated by the government. (2) The profitability of the mudharabah linkage program on BMT BUS is very good, the mudharabah contract becomes its flagship program. The funds it got from the mudharabah linkage program with several Islamic commercial banks including BRI Syariah were able to increase the profit of its establishment. While at BRI Syariah, profitability don't increase because using of the mudharabah linkage program with Islamic microfinance establishments.

Key word: linkage program, mudharabah, fund, profit, establishment.

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor. 158/1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Berikut penjelasan pedoman tersebut:

1. Konsonan

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	b
3	ت	Ta	t
4	ث	Sa	ṣ
5	ج	Jim	j
6	ح	Ha	ḥ
7	خ	Kha	kha
8	د	Dal	d
9	ذ	Zal	ẓ
10	ر	Ra	r
11	ز	Zai	z
12	س	Sin	s
13	ش	Syin	sy

14	ص	Sad	ṣ
15	ض	Dad	ḍ
16	ط	Ta	ṭ
17	ظ	Za	ẓ
18	ع	‘Ain	‘
19	غ	Gain	g
20	ف	Fa	f
21	ق	Qaf	q
22	ك	Kaf	k
23	ل	Lam	l
24	م	Mim	m
25	ن	Nun	n
26	و	Wau	w
27	ه	Ha	h
28	ء	Hamzah	’
29	ي	Ya	y

2. Vokal Pendek

...َ...	= a	كَتَبَ	kataba
...ِ...	= i	سُئِلَ	su’ila
...ُ...	= u	يَذْهَبُ	yazhabu

3. Vokal Panjang

اَ.... = ā قَالَ qāla

إِي = ī قِيلَ qīla

أُو = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَي = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR

Assalāmu’alaikum waraḥmatullāhi wa barakātuh.

Bismillāhi al-raḥmāni al-raḥīm

Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Peran Akad Mudharabah *Linkage Program* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) pada Profit Lembaga (Studi Kasus Pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)”.

Shalawat serta salam penulis haturkan kepada sang Revolusioner umat Islam, Nabi Muhammad saw. Semoga syafa’atnya dapat penulis dan pembaca peroleh hingga besuk di hari akhir.

Dalam penyusunan tesis yang sederhana ini, tidak terlepas dari dukungan maupun bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag selaku direktur pasca sarjana UIN Walisongo Semarang.

3. Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ali Murtadho, M.Ag dan Dr. Ahmad Furqon, Lc, MA selaku ketua jurusan dan sekretaris program studi S.2 Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
5. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag sebagai pembimbing I yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. H. Nur Fatoni, M,Ag, Dosen Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk senantiasa memberikan arahan, bimbingan, maupun nasehat kepada penulis dalam proses penyusunan tesis ini.
7. Kepala Perpustakaan Fakultas, FEBI, Pascasarjana UIN maupun Universitas yang telah memberikan izin dan pelayanan kepustakaan yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh dosen, Staff Pengajar, dan Karyawan di Fakultas FEBI UIN Walisongo semarang.
9. Keluarga tercinta yang sedang berada di daerah pesisir dan pantura Laut Jawa, Sluke-Rembang. Bapak Muhammad Maskut dan Ibu Siti Maemunah yang telah merawat, mendidik, dan tidak bosan mendoakan penulis dari kecil hingga hingga sekarang ini.

Adik tercinta Lu'lu'ul Muhimmah yang penulis harapkan menjadi sesosok perempuan shalehah.

10. Kawan-kawan seperjuangan di Magister Ekonomi Syariah 2016, yang selalu memotivasi dan memberi semangat kepada penulis. Canda dan semangat kalian tak terlupakan.
11. Teman-teman tim Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) Rembang yang selalu membuat penulis semangat dan ceria dalam bertugas serta menyelesaikan studi.
12. Mas (A.K.M) calon imam shaleh yang selalu mendukung penulis untuk semangat menyelesaikan studi.

Alḥamdulillāhi rabbi al'ālamīn.

Wassalāmu'alaikum waraḥmatullāhi wa barakātuh

Semarang, 16 Oktober 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	17
F. Metode Penelitian	31
G. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II : TELAAH UMUM TENTANG <i>LINKAGE PROGRAM</i>, AKAD MUDHARABAH, DAN PROFIT	
A. <i>Linkage Program</i> dalam Islam	37
B. Akad Mudharabah	53

C. Profit Prespektif Ekonomi Islam.....	61
BAB III : GAMBARAN UMUM BMT BINA UMMAT SEJAHTERA LASEM DAN BRI SYARIAH CABANG SEMARANG	
A. Gambaran Umum BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem.....	71
B. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Semarang	83
C. Implementasi Akad Mudharabah <i>Linkage Program</i> pada BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang	95
BAB IV : ANALISA PERAN AKAD MUDHARABAH <i>LINKAGE PROGRAM</i> LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DENGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS) PADA PROFIT LEMBAGA (Studi Kasus pada BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)”	
A. Implementasi akad mudharabah pada BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Syariah Cabang Semarang.....	98
B. Peran akad mudharabah <i>linkage program</i> lembaga keuangan mikro syariah dengan bank umum syariah pada profit lembaga (BMT BUS Lasem dan BRI Syariah).....	103
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	118
B. Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA.....	121
LAMPIRAN.....	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	131

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Sebaran Pembiayaan per Produk BMT BUS Lasem per Desember 2017 dan 2018
Tabel 3.2	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 dan 2016
Tabel 3.3	Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018 dan 2017
Tabel 3.4	Laporan Rasio Keuangan, Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 dan 2016
Tabel 3.5	Laporan Rasio Keuangan, Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018&2017

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Gambaran Pola *Executing*
- Gambar 2.2 Gambaran Pola *Channelinng*
- Gambar 2.3 Gambaran Pola *Joint Financing*

DAFTAR SINGKATAN

LKMS	: Lembaga Keuangan Mikro Syariah
BUS	: Bank Umum Syariah
BMT	: <i>Bait al māl wa al tamwīl</i>
BUS	: Bina Ummat sejahtera
KSPPS	: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
KJKS	: Koperasi Jasa Keuangan Syariah
UKM	: Usaha Kecil dan Menengah
LPDB	: Lembaga Pengelola Dana Bergulir
BAV	: Bahana Artha Ventura
FDR	: <i>Financing to Deposit Ratio</i>
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
NPF	: <i>Non Performing Financing</i>
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
ROA	: <i>Return On Assets</i>
ROE	: <i>Return On Equity</i>
CAR	: <i>Capital Adequacy Ratio</i>
NGO	: <i>Non Goverment Organisation</i>
DPS	: Dewan Pengawas Syariah

DSN : Dewan Syariah Nasional
BPRS : Bank Pengkreditan Rakyat Syariah
BKD : Badan Kredit Desa
KUR : Kredit Usaha Rakyat
API : Arsitektur Perbankan –syariah- Indonesia
UUS : Usaha Unit Syariah
EDC : *Electronic Data Capture*
DPK : Dana Pihak Ketiga

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Linkage program merupakan kerjasama penyaluran dana dari bank umum/bank umum syariah (BU/BUS)¹ melalui lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan mikro syariah (LKM/LKMS) dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM).² Program pembiayaan ini bersifat kemitraan (*joint partnership*).³

Linkage program merupakan sebuah strategi yang bertujuan memberdayakan dan memberikan akses permodalan usaha kecil serta menengah melalui pelibatan partisipasi dalam industri keuangan. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa BPR/S atau lembaga keuangan mikro syaria'ah seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terkadang mendapatkan masalah dalam melakukan mobilisasi dana di sektor publik. Sedangkan di pihak lain bank komersial cenderung memiliki dana yang berlebih di

¹Lihat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah. Liat juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah yang memutuskan penetapan peraturan bank Indonesia tentang unit usaha syariah.

²Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009, 2.

³Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, 307.

sektor publik (*over likuiditas*) tetapi ruang untuk menjangkau bisnis mikro terbatas ruang geraknya.⁴

Pemerintah mendukung *linkage program* dengan munculnya Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan Koperasi melalui Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009.⁵ Adanya sistem kerjasama ini, memberikan angin segar bagi lembaga keuangan mikro yang kuwalahan memenuhi permintaan masyarakat karena kebutuhan masyarakat semakin meningkat, bahkan lebih tinggi daripada dana yang terkumpul.

Adanya *linkage program* memang ditujukan untuk mendanai Usaha Kecil, dan Menengah (UKM). Sedangkan UKM lebih banyak bersentuhan langsung dengan LKM karena cakupan LKM lebih kecil dan lebih dekat dengan masyarakat terutama daerah-daerah pelosok untuk menyalurkan dana bagi lembaga-lembaga UKM.⁶

Fenomena tersebut membuat pemerintah pro dengan *linkage program* ini karena sudah menjadi pemahaman umum bahwa Usaha Kecil dan Menengah munenjadi salah satu pondasi

⁴Johan Arifin, IAIN Walisongo, “*Hubungan Hukum Kemitraan dalam Linkage Program Ekonomi Syariah, Jurnal Economica*, vol. 4 edisi 2, November (2013): 44, diakses 22 Mei 2018.

⁵Lihat Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009.

⁶Arifin, “*Hubungan Hukum Kemitraan*”, 42.

perekonomian negara. Munculnya banyak UKM disertai perkembangan-perkembangannya yang semakin meningkat sangat membantu perekonomian negara.

Berdasarkan pedoman *linkage program* pada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009, terdapat tiga skim *linkage program*, yakni *executing*, *channeling*, dan *joint financing*. Dalam pola *executing*, bank umum syariah akan menyalurkan kepada lembaga keuangan mikro (LKM), untuk selanjutnya disalurkan kepada UKM, dengan keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan LKM. Akad yang digunakan antara bank umum syariah dengan lembaga keuangan mikro pada pola ini adalah *mudharabah*.⁷

Dalam pola *channeling*, pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi/LKM melalui LKM yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari Bank Umum. Pencatatan di Bank Umum sebagai pinjaman kepada anggota LKM, sedangkan pencatatan di LKM pada *off balance sheet*.

Oleh karena pada pola *channeling* BUS akan memberikan langsung pembiayaan kepada UKM, maka risiko ditanggung oleh BUS. Dengan demikian

⁷Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Arena Hukum* Volume 8, Nomor 2 (2015): 191, diakses 22 Mei 2018, doi: [10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.3](https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00802.3)

kewenangan LKM hanyalah sebatas yang diberikan oleh BUS, LKM tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan kecuali setelah adanya kuasa yang diberikan oleh BUS. Dasar yang dipergunakan adalah akad *Wakalah*.⁸ Adapun akad antara LKM dengan UKM disesuaikan dengan kebutuhan UKM, dengan tetap memperhatikan undang-undnag yang ada.

Sedangkan pola *joint financing* merupakan pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi terhadap anggota koperasi. Pencatatan *outstanding credit* bagian Bank Umum dan bagian Koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi.⁹ Jenis akad yang dipergunakan adalah *Musyarakah* atau *Joint Venture Profit Sharing*. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (dalam hal ini adalah BUS dan LKM) mengumpulkan modal untuk membiayai UKM.¹⁰

Penulis meneliti pola *executing* yang menggunakan akad mudharabah karena *pertama*, pada pola ini sebenarnya tidak ada hubungan antara mudharib (Bank Umum Syariah) kepada UKM. Sebab dia hanya bertugas mendanai LKM sebagai nasabahnya

⁸Siti Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage Program*”, 190.

⁹Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009, 8-9.

¹⁰Siti Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage Program*”, 191.

(*shahibul maal*), terkait bagaimana LKM mengelola dana itu menjadi urusan LKM, tanpa ada ikut campur dari bank umum syariah.

Kedua, dalam prinsip keuntungan (laba), pada *linkage program executing* profit yang diperoleh bank umum akan lebih kecil karena melalui tangan kedua atau bahkan tidak ada bedanya dengan pembiayaan biasa karena dia hanya berhenti pada penyaluran dana kepada LKM tanpa berurusan dengan UKM. Demikian pula profit yang diperoleh LKM.

Pada pembiayaan mudharabah biasa, LKM bertindak sebagai *shahibul maal* dari nasabah yang menjadi *mudharib* dan sebagai *mudharib* dari nasabah yang bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana.¹¹ Bisa dikatakan ia sudah melakukan dua level. Jika LKM juga melakukan *linkage program*, maka ia naik menjadi melakukan tiga level yakni sebagai *mudharib* dari bank umum syariah.

Sebagai lembaga keuangan, tentu LKM tetap berorientasi pada *profit* meskipun ia pun sebagai *bait al-maal* (rumah harta) yang tidak mengorientasikan pada *profit*. Jika tujuan bank umum syariah melakukan pembiayaan ke LKM untuk dioperasionalkan kepada nasabah, maka profit akan semakin kecil karena ia sebagai tangan kedua. Hal itu tentu

¹¹Muhammad Syafi'i Antonio , *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 137.

bertentangan dengan manajemen bisnis, yakni seharusnya lembaga bisa memperoleh *profit* lebih banyak namun dikarenakan *linkage program* justru mengganggu kinerjanya atau menurunkan *profitnya*.

Penulis mengkaji Koperasi Jasa Keuangan Syaria'h Baitul *Maal Wat Tamwil* (KJKS-BMT) Bina Ummat Sejahtera Lasem yang sekarang sudah berubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul *Maal Wat Tamwil* (KSPPS-BMT).¹² Sebab *pertama*, BMT ini menggunakan sistem *linkage program* mengingat hingga 2018 ini masih ada beberapa BMT di beberapa kota yang tidak menggunakan *linkage program*. *Kedua*, 99% pola *linkage program* BMT ini dengan BUS adalah menggunakan akad mudharabah.¹³ Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari devisi operasional dan IT BMT BUS, BMT BUS menggunakan *linkage program* *executing* dan *channeling*.

Pada *executing*, BMT BUS ber*linkage program* dengan enam Bank Umum Syariah yaitu:

1. BRI Syariah

¹²Lihat Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn.

¹³Hasil wawancara dengan narasumber Wiwik Purwanti (sekretaris dirut BMT BUS) pada 14 Mei 2018.

2. BNI Syariah
3. Bank Jateng Syariah
4. Bank Jabar Banten Syariah (BJBS)
5. Bank DKI Syariah
6. Bank Muamalat.

Keenam bank umum syariah tersebut menggunakan *linkage program* akad mudharabah dengan BMT BUS kecuali bank Muamalat. Serta dengan dua lembaga pemerintah yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Bahana Artha Ventura (BAV).¹⁴

Sedangkan *linkage program* yang *channeling* bersama dengan Bank Panin Syariah.

Penulis memilih bank BRI Syariah Cabang Semarang karena dia termasuk lama bekerjasama dengan BMT BUS Lasem terhitung 6 tahun sejak 2012 hingga kini. BRI terlihat sangat percaya terhadap kredibilitas BMT BUS. Padahal ketika mengajukan pembiayaan BMT BUS tidak mengeluarkan modal karena dana 100% dari BRI Syariah selaku *shahibul maal*.¹⁵

BRI menganggap BMT BUS memiliki a) kapabilitas (kemampuan) dalam mengelola keuangan yang cukup baik b) BMT BUS mendorong nasabahnya sebagai mitra kerja dan

¹⁴Hasil wawancara dengan narasumber Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS) pada Senin, 14 Januari 2019.

¹⁵Hasil wawancara dengan Muis Hidayat (*Accounting Officer* BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 19 Juli 2019.

ladang dakwah perkembangan ekonomi syariah c)Laporan keuangan yang cukup mumpuni (bagus) d)Manajemen yang cukup modal di bidangnya (profesioanl).¹⁶

Sehingga, penulis mengangkat penelitian dengan judul **“Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage* Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (BUS) (Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil rumusan masalah:

1. Bagaimana implementasi akad mudharabah *linkage program* pada BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang?
2. Bagaimana profitabilitas akad mudharabah *linkage program* lembaga keuangan mikro syariah dengan bank umum syariah (BMT BUS Lasem dan BRI Syariah)?

¹⁶Hasil wawancara dengan Muis Hidayat (*Accounting Officer* BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 19 Juli 2019.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, adalah:

1. Mengetahui implementasi akad mudharabah *linkage program* pada BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Syariah Cabang Semarang.
2. Mengetahui profitabilitas akad mudharabah *linkage program* lembaga keuangan syariah dengan bank umum syariah pada profit lembaga (BMT BUS Lasem dan BRI Syariah).

Adapun manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Menambah wawasan ilmuan ekonomi muslim tentang bagaimana akad *mudharabah linkage program* lembaga keuangan bank maupun non bank syariah.
2. Diharapkan mampu dijadikan dasar setiap orang, terutama Muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat yang beragam suku, ras, ataupun agama. Serta kereligiusan muslim tetap terjaga tanpa merendahkan agama lain.

D. Kajian Pustaka

Oleh karena itu, demi keaslian penelitian, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang berkaitan maupun serupa dengan penelitian ini, antara lain:

Pertama, penelitian yang berjudul Penerapan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada *Linkage Program* Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Nindya Amala Madiun¹⁷ yang dilakukan oleh Ria Rustiani. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan akad pembiayaan *mudharabah* pada *Linkage Program* Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Nindya Amala Madiun serta mengetahui hambatan yang timbul pada penerapan akad pembiayaan *mudharabah* pada *linkage program* tersebut.

Kedua, penelitian Denizar Abdurrahman dan Mi'raj dan Muhammad Nafi yang berjudul "*Linkage Program* Bank Syariah dengan BMT: Tinjauan Kritis bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam yang lebih Kaffah". Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebab BMT tidak melanjutkan *linkage program* dengan bank umum syariah. Hasil penelitian ini adalah BMT tidak melanjutkan *linkage program* dengan bank umum syariah karena *linkage program* memberatkan bagi BMT.¹⁸

¹⁷Ria Rustiani, "Penerapan Akad Pembiayaan *Mudharabah* pada *Linkage Program* Bank Syariah Mandiri Cabang Madiun dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) Nindya Amala Madiun," (Tesis, Universitas Sebelas Maret, 2016), 17.

¹⁸Denizar Abdurrahman Mi'raj dan Muhammad Nafik H.R, *Linkage Program Bank Syariah dengan BMT: Tinjauan Kritis bagi Pengembangan*,

Ketiga, penelitian Febri Antika Sonya Harum Dapta yang berjudul “Perbedaan Pola *Channeling* dan *Executing* pada Pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”. Penelitian ini meneliti perbedaan pola *channeling* dan *executing*. Febri Antika menyimpulkan bahwa prosedur dan skema kedua pola tersebut berbeda. Perbedaannya terletak pada peran lembaga *linkage program* dalam proses pengajuan pembiayaan.¹⁹

Keempat, penelitian yang dilakukan Muhsinun (2015) yang berjudul “Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi kasus pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)”.²⁰

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi langkah-langkah BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta dalam pengelolaan risiko-risiko terkait dengan produk mudharabah dan musyarakah, dan untuk mengevaluasi langkah-langkah dan solusi efektif apa saja yang

Sistem Keuangan Islam yang lebih Kaffah, JESTT Vol.2 No. 10 Oktober 2015, 856., diakses pada 2 Januari 2019.

¹⁹Febri Antika Sonya Harum Dapta, “Perbedaan Pola *Channeling* dan *Executing* pada Pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga”.

²⁰Muhsinun, “Evaluasi Manajemen Risiko Produk Mudharabah dan Musyarakah dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bagi Hasil (Studi kasus pada BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta)”, 2015.

dilakukan BPD DIY Cabang Syariah dan Bank Syariah Mandiri Cabang Yogyakarta terhadap penyelesaian produk mudharabah dan musyarakah bermasalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*).

Hasilnya, pembiayaan mudharabah disalurkan dengan menerapkan *linkage program*. Penerapan *linkage program* ini bertujuan mengurangi tingginya risiko dari pembiayaan berbasis bagi hasil. Sedangkan musyarakah dapat menjadi solusi alternatif atas masalah over likuiditas yang terjadi. Proses penanganan pembiayaan bermasalah dilakukan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan, yaitu dengan pembiayaan lancar, pembiayaan potensial bermasalah atau pembiayaan yang kurang lancar, pembiayaan diragukan atau macet.

Kelima, tesis Ayu Nur Hasanah (2005), “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pontianak”.²¹ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan kebenaran dalam pembahasan yang ada serta untuk melihat penerapan suatu aturan hukum dalam masyarakat. Analisis yang digunakan adalah deskriptif.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah

²¹Nur Ayu Hasanah, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pontianak”, Tesis, Universitas Diponegoro, 2005.

pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak serta mengetahui bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak Bank Syariah Cabang Pontianak dalam menangani pembiayaan yang bermasalah yang dilakukan oleh Nasabah. Selain itu, tesis ini bertujuan untuk mengetahui sanksi apa yang ditetapkan oleh *shahibul maal* apabila *mudharib* melanggar perjanjian dalam akad pembiayaan Mudharabah bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak.²²

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil dilakukan sebagaimana sistem mudharabah yang semestinya. Dalam pemberian pembiayaan pada umumnya Bank memiliki tipe pembiayaan Mudharabah Muqayyadah, dimana Bank sebagai wakil *Shāhib al Māl* menentukan pembatasan atau memberikan syarat kepada nasabah selaku *Mudharib* dalam mengelola dana seperti untuk melakukan Mudharabah bidang tertentu, cara, waktu dan tempat tertentu saja. Pelaksanaan perjanjian pembiayaan penyaluran dana berdasarkan prinsip bagi hasil pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi yang berpedoman pada prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) ditambah 7 aspek (yuridi, manajemen, teknis, pemasaran, keuangan, social ekonomi, agunan) serta aspek syariah.

²²Nur Ayu Hasanah, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan”, 9-10

Keenam adalah penelitian Siti Hamidah (2016) yang berjudul Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir, menganalisis kebijakan pengaturan *Linkage Program* bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam hukum positif Indonesia yang ideal baik secara substansi maupun prosedural, sebagai rujukan bagi lembaga keuangan syariah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia.²³

Hasil penelitian ini adalah terdapat beberapa aturan yang mengatur *Linkage Program* bagi Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia dan pengaturannya tersebar dalam beberapa jenis aturan. Kebijakan pengaturan *Linkage Program* dapat ditemukan sejak dicanangkannya Arsitektur Perbankan Indonesia, dalam cetak biru khususnya dalam *Generic Linkage Program* Bank Indonesia (Cetak biru Perbankan Indonesia ini diibaratkan sebagai “GBHN” bagi perbankan di Indonesia).

Selain itu, diatur juga khusus untuk koperasi dalam peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha kecil dan

²³Siti Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage Program*”, 190.

maenengah Republik Indonesia nomor: 03/per/M.KUKM/III/2009 tentang: Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum dengan Koperasi. Secara garis besar, kebijakan berkaitan dengan *Linkage Program* untuk Lembaga Keuangan Syariah dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang berkaitan dengan substantif/materiel, dan administratif/prosedural.

Dengan tersebarnya dalam berbagai aturan tersebut diperlukan sebuah peraturan khusus tentang *linkage program*, yang terdapat dalam wadah POJK (peraturan Otoritas Jasa Keuangan) mengingat lembaga keuangan terkait berada di bawah pengawasan OJK. Pentingnya kaidah substantif untuk *linkage program* adalah dalam rangka pemberdayaan UKM yang membutuhkan peraturan yang lengkap. Beberapa kekurangan dalam pengaturan *linkage program* mendorong pelaku membuat perjanjian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah, maupun pedoman dalam *linkage program*.²⁴

Ketujuh, Penelitian Yoga Tantular Rachman (2015) yang berjudul Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan

²⁴Siti Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage Program*, 200-201.

Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013). Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif.

Hasil penelitian ini adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan mudharabah, *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Pembiayaan Mudharabah, *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah. Sedangkan secara bersama-sama, *Financing to Deposit Ratio*, *Non Performing Financing* *Return On Assets*, dan *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh signifikan terhadap Pembiayaan Mudharabah.²⁵

²⁵Yoga Tantular Rachman dan Ahmad Apandi, Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013), *Proceedings ICIEF'15*(2015): 1508, diakses pada 17 September 2019.

E. Kerangka Teori

1. Definisi Profit/Laba

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.²⁶

Harahap menyatakan bahwa laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sedangkan Nafarin menyebutkan bahwa profit/laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.²⁷

Sedangkan Supomo menyatakan bahwa profit/laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya. Dikuatkan dengan pendapat Kuswadi yang menyatakan bahwa perhitungan laba diperoleh dari pendapatan dikurangi semua biaya.²⁸

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya.

²⁶<http://repository.usu.ac.idbr>

²⁷M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 788.

²⁸Kuswadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 135.

Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak.

Ekonomi syariah mengakui adanya profit/laba/keuntungan (*al-ribhu*) dalam bisnis. Keuntungan bisnis dalam pandangan para ulama disimpulkan sebagai hasil dari suatu usaha (*al-'amal*) dan modal (*ra's al-mal*).²⁹ Peranan usaha dan kerja menjadi sangat penting untuk meraih keuntungan.

Dasar hukum yang menjadi dasar diperbolehkannya mengambil keuntungan adalah Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا
مُهْتَدِينَ ١٦

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”³⁰

Selain itu Allah juga berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجْرَةً لَّن تَبُورَ ٢٩

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam

²⁹<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, Landasan Teori, 26. Diakses pada 1 Desember 2018.

³⁰Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 3.

dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi(QS. Faatir: 29)³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُنُكُمْ عَلَىٰ تَجَرَّةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ ٱلْإِيم ١٠

“Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?” (QS. Ash-Shaff:10)³²

Ekonomi Islam memandang keuntungan dalam bisnis tidak hanya berupa profit (laba) yang bersifat materi saja, namun ada juga pandangan tentang keuntungan non materi yaitu berupa benefit, yang diterjemahkan dengan keberkahan. Sehingga dirumuskan bahwa laba ditambah keberkahan akan menghasilkan maslahat, yakni kesuksesan di dunia dan akhirat.³³

Laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba melainkan jugakualitas. Lebih komprehensif dibanding keuntungan secara kuantitas yakni laba dapat berarti, hasil dari *bersabar*, *mensucikan diri*, *beriman*, *berdakwah*, *berittibā'*, *berinfaq*, dan laba adalah *hidāyah dari Alloh*. Semua terakumulasikan dalam

³¹ Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 437.

³² Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 552.

³³ <http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, *Landasan Teori*, 27. Diakses pada 1

Desember 2018

jannah dan *kebahagian kekal di akhirat*. Inilah makna laba yang menjadi orientasi dasar dalam konsep teori laba ekonomi Islam.³⁴

Menurut para ulama tafsir dan fiqh, dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan dari modal dan atau kelebihan dari modal serta beban-beban biaya sebagai akibat dari aktivitas bisnis. Laba dihasilkan dari dua unsur utama, yaitu usaha (*al-a'mal*) dan modal (*ra'sul mal*).

Seandainya laba diperoleh bukan dari hasil dua unsur tersebut, maka ia bukanlah dinamakan keuntungan. Sebagaimana praktik membungakan uang (*ribawi*), ekonomi Islam tidak menganggap hasil dari praktik membungakan uang sebagai keuntungan.³⁵

Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِتَرْبُوْا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا
ءَاتَيْتُم مِّن زَكٰوةٍ تَرْبُدُوْنَ وَجَهَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۝ ٣٩

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum:39)³⁶

³⁴Fachri Fachrudin, *Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'amalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)*, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 70.

³⁵<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, *Landasan Teori*, 27

³⁶Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 408.

Sedangkan hadits tentang konsep laba adalah

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا
يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ
بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَذَعَالَهُ بِالْبَرْكََةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ
فِيهِ

“Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya.” (HR. Bukhari, no. 3443)³⁷

Implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang didapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu.

Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi

³⁷ Hadits Riwayat Bukhari no.3443.

yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat.³⁸

2. Jenis-Jenis Profit

Jenis-jenis laba / profit, antara lain :

- a) Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
- b) Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.³⁹

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.

³⁸Fachri Fachrudin, *Kajian Teori Laba*, 73-74.

³⁹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011), 303.

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan Laba} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t - \text{Laba bersih tahun } t-1}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

dikurangi beban atau biaya.

$$\text{Laba} = \text{Keuntungan} - \text{Beban/Biaya}$$

3. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:⁴⁰ *pertama*, besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.

Kedua, umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah. *Ketiga*, tingkat leverage. Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.

Keeempat, tingkat penjualan. Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi. *Kelima*,

⁴⁰<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, *Landasan Teori*, 25-26.

Perubahan laba masa lalu. Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

4. Mudharabah

Secara etimologi, mudharabah berasal dari bahasa Arab yaitu kata dharb (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan. Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangan atau kakinya dalam menjalankan usaha untuk mencari karunia Allah.⁴¹ Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis.

Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* (ضرب في الأرض) tepatnya dalam Alqur'an yaitu يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ⁴² yang artinya mereka berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Oleh karena pekerjaan dan perjalanannya, mudharib menjadi berhak atas sebagian keuntungan usaha.⁴³

Mudharabah disebut juga *al-qiradh*. Mudharabah adalah istilah yang biasa digunakan oleh orang Irak sedangkan orang Hijaz membahasakannya dengan kata *al-qardhu* atau *qiradh*.

⁴¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah-Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranada Media Group, 2012), 367.

⁴² Dini Firmansyah, "Peranan Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat", (Universitas Islam Negeri Ampel, 2014), 22.

⁴³ Mervyn K Lewis dan Lativa M. Algaoun, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 67.

Secara istilah, dua kata tersebut mengandung arti yang sama. *Qiradh* dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. *Qiradh* bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musaawah* (kesamaan) karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.⁴⁴

Secara istilah, para ulama mengartikan *mudharabah* dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama yaitu suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shaahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. *Mudharabah* adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada pengelola untuk digolangkan, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena ia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.⁴⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal

⁴⁴Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 66. Lihat juga Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128.

⁴⁵Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, 67.

(*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

Dalam mudharabah, satu pihak memberikan kontribusi permodalan dan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran/ide, dan manajemen.⁴⁶ Oleh karena itu, pihak pertama disebut *shibul maal* (*financier*), sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* (*entrepreneur*).

Implementasi akad mudharabah dalam pembiayaan h akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (*shahibul maal* atau Bank Syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan mebagi keuntungan usaha sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.⁴⁷

⁴⁶Muhamad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, 19.

⁴⁷Zubairi Hasan, *Undang Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 79-80.

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syari'ah, namun tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati.⁴⁸ Sangat variatif bahkan bisa 99:1. Namun yang tidak diperbolehkan oleh para ahli fiqh adalah 100:0.⁴⁹

Keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan maka nisbahnya 40 persen.

Dalil Alquran yang menjadi landasan akad mudharabah adalah QS. Al- Muzammil ayat 20:

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَّرْضَىٰ
وَأَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاآخَرُونَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ٢٠

⁴⁸Muhamad, Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit margin pada Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2006), 51.

⁴⁹Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 2003), 185.

“.....karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran.⁵⁰ Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah.....(20)

Mudharib adalah orang yang berjalan (bepergian) di muka bumi untuk mencari karunia Allah.

Sebagaimana firman-Nya pula pada QS Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَلِيلٍ
لِّمَنِ الضَّالِّينَ ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”⁵¹

⁵⁰Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 575.

⁵¹Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, 31.

Sedangkan haditsnya, antara lain:

عن صالح طهيب, عن أبيه , قال: قال رسول الله صلى الله
والمقارضة, وأخلا عليه وسلم : ثلاث فيهنّ البركة, البيع الى أجل
ط, البُرّ بالشعير, للبيت لا للبيع.⁵²

“Ada tiga hal yang mengandung barakah:, jual beli tidak secara tunai (tangguh), muqaradhah/mudharabah mencampur gandum dengan jewawut (tepung) untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).⁵³

Selain itu, dari segi sunnah, para fuqaha bersandar pada preseden dari perjanjian mudharabah yang ditandatangani nabi Muhammad dengan Khadijah sebelum pernikahannya. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri yakni ke Syiria. Pada kasus tersebut, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).⁵⁴

⁵²Imam Ibnu Maajah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al.. “*Sunan Ibnu Maajah Juz 2*” (Daar al-Hadits Al-Qaahirah, 2010), 314.

⁵³Huda, Nurul, dkk. Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 54.

⁵⁴Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis*, 180.

Ulama membagi akad mudharabah menjadi dua macam, yaitu:

a. Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah murlaqah yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Penyelenggara usaha memiliki kebebasan dalam menggunakan modal yang dipercayakan oleh pemodal kepada penyelenggara usaha.⁵⁵

Sesuai dengan kesepakatan, penyelenggara usaha mempunyai hak. Antara lain ia memiliki hak untuk menyertakan modal ke bisnis lain, hak untuk memperoleh modal dari partner lain atau ketiga untuk ditanamkan pada bisnis *mudharabah*, ia punya hak untuk bekerja sama dengan *partner* ketiga, dan memberikan modal pemilik kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan bisnis mudharabah ini.⁵⁶

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Penyelenggara usaha hanya mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*.⁵⁷

⁵⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, 19

⁵⁶Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 31. Lihat juga Huda, Nurul, dkk., “Lembaga Keuangan Islam”, 77.

⁵⁷Huda, Nurul, dkk. “Lembaga Keuangan Islam”, 77.

Misalnya komoditas yang diusahakan hanya komoditas tertentu saja yang sudah disepakati, tidak boleh menyelenggarakan komoditas atau usaha lain, harus membeli barang atau sumber daya ekonomi di tempat atau partner tertentu dan tak boleh di tempat lain, dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

a) Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Maal Wat Tamwil Bina Umat Sejahtera (KSPPS BMT BUS) Lasem yang berlokasi di Jl. Raya No. 16, Gedongmulyo, Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kode pos: 59271. Kantor Pusat : Jl. Untung Suropati No. 16 Lasem Telp.(0295) 532376.

Penelitian juga dilakukan di BRI Syariah Kantor Cabang Semarang yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No.657. Wonodri, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah.

b) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

c) Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara kepada pengelola maupun nasabah *Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS)* dan BRI Syariah maupun

data-data yang diambil langsung dari pihak BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang.

Sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai studi pustaka dan literatur, baik dari buku, jurnal, penelitian terdahulu maupun referensi lain baik dalam media cetak maupun internet yang berhubungan dengan penelitian.

d) Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan manfaat empiris, metode pengumpulan data kualitatif yang independen adalah menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁵⁸ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Wawancara. Wawancara merupakan suatu proses agar mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab atau dialog secara langsung dengan informan. Wawancara memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari informan dari pokok permasalahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terpimpin (*Guided interview /structured interview*) artinya wawancara ini dilakukan dengan menggunakan kerangka pertanyaan agar tidak banyak waktu yang digunakan dalam

⁵⁸M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), edisi kedua, hal.110.

melakukan *interview*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan muncul pertanyaan yang baru agar pengumpulan data ini tidak monoton dan terkesan formal, tetapi dibuat santai dan tetap terarah.⁵⁹

Kedua, Observasi. Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh informasi dari masalah yang terjadi. Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk memahami proses terjadinya wawancara.

Ketiga, dokumentasi. Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penelitian sosial. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian. Penggalan data ini dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perilaku konsumsi, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah, website dan lain sebagainya.

⁵⁹Hadari Nawan dan M. Martini, *Instrumen Penelitian bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hal.101.

e) Metode Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data menggunakan tiga alur yakni:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (yaitu membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi dan jika perlu menulis memo). Reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2 Penyajian Data

Berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Kegiatan analisis yang ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan penulisan dan pemahamsan. Oleh karena itu,

penulisan tesis ini dibagi dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat memahami dengan mudah tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini yang menjelaskan tentang kajian teoritik tentang konsep laba atau profit, atau keuntungan.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian meliputi sejarah singkat berdirinya BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang, profil BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang, struktural kepengurusan BMT BUS dan BRI Syariah Cabang Semarang, laporan keuangan BMT BUS dan BRI Syariah Cabang Semarang atas pembiayaan akad mudharabah pada *linkage program*, pemaparan data, *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Return On Assets* (ROA) dan hasil wawancara mengenai peran akad

mudharabh terhadap profit BMT BUS maupun BRI Syariah Cabang Semarang.

BAB IV : ANALISIS PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas hasil analisis profit atas akad mudharabah pada linkage program terhadap lembaga BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang.

BAB V : PENUTUP

Bab lima merupakan bab yang menuliskan tentang kesimpulan dan saran-saran atau rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TELAAH UMUM TENTANG *LINKAGE PROGRAM*, AKAD MUDHARABAH, DAN PROFIT

A. *Linkage Program* dalam Islam

1. Definisi *Linkage program*

*Linkage Program*¹ adalah program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta kredit usaha rakyat (KUR) dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK)². Atau, *Linkage program* merupakan kerjasama yang dilaksanakan bank umum kepada lembaga keuangan mikro (LKM) dalam bentuk pembiayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kegiatan usaha kecil mikro (UKM)³.

Sedangkan yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Salah satu macamnya adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah, yang selanjutnya disebut KJKS yaitu

¹*Linkage program* merupakan sebuah strategi yang bertujuan memberdayakan dan memberikan akses permodalan usaha kecil serta menengahkan melalui pelibatan partisipasi dalam industri keuangan.

²Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan kMenengah Republik Indonesia. No. 03/Per/M.KUKM/III/2009

³Euis Amalia, Keadilan Distributif dalam Islam, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, 307.

koperasi jasa yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah);⁴

Anggota Koperasi yang dimaksud dalam *Linkage Program* ini adalah anggota tetap dan atau calon anggota Koperasi (termasuk anggota yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil), yang keanggotaannya diatur di dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga masing-masing Koperasi.

Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) secara umum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Bab 1 Pasal 1 Tentang Lembaga Keuangan Syariah, LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Adapun yang dimaksud Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Bab IV Pasal 12 adalah lembaga keuangan mikro yang menggunakan prinsip-prinsip syariah dengan adanya Dewan

⁴Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 2.

Pengawas Syariah (DPS) guna mengawasi operasioanal yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).⁵

Dalam Operasioanalnya, Lembaga Keuangan Syariah memiliki prinsip antara lain, *pertama* keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. *Kedua*, kemitraan, bararti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.

Ketiga, transparansi, yakni lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. *Kelima*, universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*

Berdasarkan kajian dari *Sharia Economic Outlook* 2014, Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua bagian besar yaitu LKM berbentuk Bank dan LKM non-Bank. LKM berbentuk bank terdiri atas tiga kategori, yakni BPR/BPRS, unit mikro dari bank komersial, dan Badan Kredit Desa (BKD). Sedangkan LKM non Bank dibagi menjadi lembaga yang berbentuk formal dan berbentuk non formal.⁶

⁵Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Bab IV Pasal 12.

⁶Mumuh Muhammad, dkk, *The Linkage Program of Mosque Empowerment* (LPME): Menciptakan *Financial Inclusion* yang Efektif oleh

LKM non Bank yang bersifat formal adalah Koperasi, Koperasi Jasa Syariah, Lembaga Gadai, Lembaga Gadai Syariah, Lembaga Dana Kredit Pedesaan, dan Lembaga Zakat milik pemerintah. Sedangkan yang bersifat non formal adalah lembaga zakat yang berbentuk *Non Governmnet Organization* (NGO) dan program arisan.

2. Analisa Koperasi Peserta *Linkage Program* dengan Bank Umum serta Kode Etiknya

- a. Kriteria Koperasi Peserta *Linkage Program* dengan Bank Umum (untuk UMK Non KUR) Pola Syariah

Kriteria Koperasi Peserta *Linkage Program* dengan Bank Umum (untuk UMK Non KUR) Pola Syariah berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009⁷, yaitu telah menggunakan sistem syariah, pengikatan menggunakan akad syariah, sudah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun, bagi hasil selama 2 (dua) tahun terakhir positif.

Selain itu, *outstanding* pembiayaan yang diberikan di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik atau Koperasi Jasa Audit, dan diumumkan kepada anggotanya, *Non Performing Financing* (NPF) maksimum 5%

Lembaga Keuangan Syariah dalam Rangka Memberdayakan Ekonomi Ummat, Bandung, 2015, 6.

⁷Lihat peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009.

dan mempunyai anggota tetap dan/atau calon anggota minimal sebanyak 100 orang.⁸

Sedangkan kriteria Koperasi peserta *Linkage Program* dengan Bank Umum peserta KUR (untuk UMK KUR) Pola Syariah memiliki ketentuan dan persyaratan, antara lain: telah memiliki badan hukum, telah melakukan usaha simpan pinjam secara aktif minimal 6 (enam) bulan, memiliki pengurus yang dipilih oleh anggota, memiliki AD/ART, minimal aturan tertulis, pengurus bersedia bertanggung jawab atas pinjaman yang diterima dan/atau disalurkan melalui koperasi kepada anggotanya, mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai, tidak memiliki tunggakan kredit/pembiayaan di bank maupun lembaga keuangan lainnya.⁹

b. Kode Etik *Linkage Program*

Berdasarkan peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009, kode etik *linkage program* yaitu:

Pertama, bagi anggota/mitra pembiayaan KJKS/UJKS yang telah naik kelas (dari debitur mikro menjadi kecil) dan memerlukan dana pembiayaan yang lebih besar, namun KJKS/UJKS-Koperasi tidak mampu membiayai, maka BUS/UUS

⁸Lihat peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan LKM/Koperasi.

⁹Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi.

dapat membiayai anggota KJKS/UJKS-Koperasi dimaksud dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang sehat.

Kedua, BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi harus transparan dalam memberikan dan menyampaikan informasi yang terkait dengan *Linkage Program* sejauh tidak melanggar ketentuan yang berlaku (seperti: laporan keuangan, struktur pendanaan dan profil koperasi/ *company profile*).

Ketiga, bagi KJKS/UJKS-Koperasi, satu jaminan hanya untuk dijaminan kepada satu *shahibul maal* mitra pembiayaan (BUS/UUS).

Keempat, BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi yang melaksanakan *Linkage Program* dengan pola *joint financing* dan *channeling*, tidak diperkenankan membebani debitur dengan margin/nisbah bagi hasil yang lebih tinggi dari harga pasar untuk sektor usaha UMK yang dibiayai.¹⁰

Kelima, KJKS/UJKS-Koperasi yang mengikuti *Linkage Program* harus memelihara predikat penilaian kesehatan. *Keenam*, setiap pelanggaran kode etik di atas oleh BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi dilaporkan kepada Bank Indonesia dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

¹⁰Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 13-14.

3. Model Pola *Linkage Program* secara Kovenvensional dan Syariah

Bank Indonesia melalui Arsitektur Perbankan Syariah Indonesia (API) mengeluarkan *Generic Linkage Program* yang berisi mengenai aturan-aturan *linkage program* bagi Bank Umum dan Bank Umum Syariah serta Lembaga Keuangan Mikro. Terdapat tiga pola *linkage program* konvensional di dalam aturan tersebut, yakni:

1. *Executing*,

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada koperasi dalam rangka pinjaman/pembiayaan untuk disalurkan kepada anggota Koperasi. Pencatatan di Bank Umum sebagai pinjaman kepada Koperasi, sedangkan pencatatan di koperasi sebagai pinjaman kepada anggota koperasi.¹¹

Akad mudharabah merupakan akad yang digunakan pada pola *executing* model syariah. Pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum dengan LKM/Koperasi¹², disebutkan model *linkage program* pola syariah, sebagai berikut:

¹¹Lihat peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum dengan LKM/Koperasi, 4.

¹²Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 12.

- a) Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung oleh KJKS/UJKS-Koperasi;
- 2) Distribusi pendapatan, sesuai dengan nisbah yang disepakati antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi;
- 3) Penentuan besarnya nisbah bagi hasil/*margin* bagi anggota koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
- 4) Jaminan, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;
- 5) Jaminan anggota Koperasi, sesuai yang dipersyaratkan KJKS/UJKS-Koperasi;
- 6) Akad Pembiayaan kepada anggota LKM/ koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi.¹³

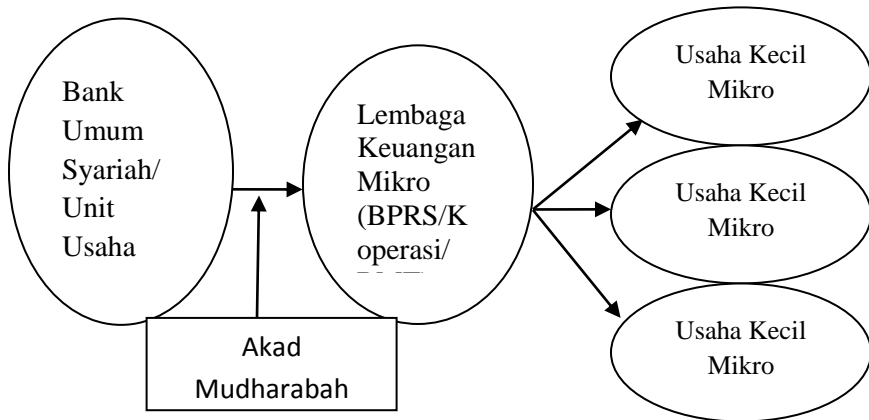
Jadi pada pola *executing*, BUS akan menyalurkan dana kepada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), baik itu BPRS, Koperasi, BMT atau lainnya, untuk selanjutnya disalurkan kepada nasabah UKM (*end user*), dengan keputusan siapa calon mitra (UKM) berada di tangan LKM sebagai konsekuensi dari keputusannya. Dengan kata lain, Lembaga

¹³Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 12.

Keuangan Mikro Syariah memiliki wewenang sepenuhnya untuk menargetkan nasabah pembiayaan.

Menurut Sudarsono (2006: 113), *executing* disebut juga penyaluran dana investasi terikat, yang pengertiannya adalah suatu akad kerja sama usaha antara nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan bank sebagai pemilik dana (*shahibu al-mal*) di mana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi, dan persyaratan lainnya, serta bank ikut menanggung risiko pengelolaan dana.¹⁴

Apabila digambarkan, maka skim *executing* adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1. Gambaran Pola *Executing*.

¹⁴ Febri Antika Sonya Harum Dapta, "Perbedaan Pola *Channeling* dan *Executing* pada Pembiayaan *Linkage Program* di Bank Syariah Mandiri Cabang Salatiga, 258.

Akad yang digunakan antara BUS dan LKMS adalah mudharabah. Akad mudharabah ini merupakan suatu bentuk *Equity Financing*, penyandang dana (*shahibul mal*) adalah BUS/UUS dan LKMS bertindak sebagai *entrepreneur/mudharib*. Secara teknis, pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang digunakan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Atas dasar inilah, maka pihak BUS/UUS tidak bertanggungjawab atas permasalahan dalam pembiayaan kepada UKM.¹⁵

Keuntungan usaha *linkage program* sebagaimana prinsip mudharabah yakni nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syari'ah, namun tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain.

Sedangkan akad yang digunakan antara LKMS dan nasabah (*end user*) adalah sesuai kebutuhan nasabah. Apabila terjadi

¹⁵Siti Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah" *Jurnal Arena Hukum Volume 8, Nomor 2* (2015): 190, diakses 22 Mei 2018.

kegagalan pembiayaan akibat *normal business lose* maka resiko ditanggung oleh LKMS.

Dasar hukum bagi pelaksanaan akad *mudharabah*, selain bersumber kepada Al-Qur'an juga berdasar pada hadist dan ijtihad. Dalam hukum positif Indonesia, ketentuan khusus tentang *mudharabah* telah tertuang dalam UU perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, khususnya pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, salah satunya adalah berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.¹⁶

Selain yang tertuang dalam UU, dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) juga diatur tentang *mudharabah*, antara lain adalah PBI No. 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya PBI No.: 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Selain PBI, pengaturan tentang *mudharabah* juga terdapat dalam berbagai aturan lain. Misalnya dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang menjadi pedoman hakim Pengadilan Agama dalam memutus sengketa ekonomi syariah.¹⁷

¹⁶Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 228.

¹⁷Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage Program*, 190.

2. *Channeling*,

Pinjaman yang diberikan oleh bank umum kepada anggota koperasi melalui koperasi yang bertindak sebagai agen dan tidak mempunyai kewenangan memutus kredit kecuali mendapat surat kuasa dari Bank Umum. Pencatatan di Bank Umum sebagai pinjaman kepada anggota koperasi, sedangkan pencatatan di Koperasi pada *off balance sheet*.¹⁸

Pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* antara Bank Umum Dengan Koperasi, disebutkan model *linkage program channeling* pola syariah sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kerugian bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung oleh BUS/UUS;
2. Distribusi pendapatan :
 - a) BUS/UUS memperoleh pendapatan dari *nisbah* bagi hasil/*margin* yang disepakati dengan UMK;
 - b) KJKS/UJKS-Koperasi mendapatkan *fee* yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi;

¹⁸Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 12.

3. Penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil/*margin* bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;
4. Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;
5. Akad pembiayaan kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;
6. Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.¹⁹

Jadi, pada *channeling* BUS/UUS akan memberikan langsung pembiayaan kepada UKM. Sehingga risiko ditanggung oleh BUS/UUS. Dengan demikian kewenangan LKM hanyalah sebatas yang diberikan oleh BUS/UUS, LKM tidak memiliki kewenangan memutus pembiayaan kecuali setelah adanya kuasa yang diberikan oleh BUS/UUS. Dasar yang dipergunakan adalah akad *Wakalah*.²⁰ *Al-wakalah* yaitu wakil atau pendelegasian untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu.²¹

BUS/UUS mendapatkan pendapatan dari nisbah bagi hasil/*margin* yang disepakati, sedang LKM mendapatkan

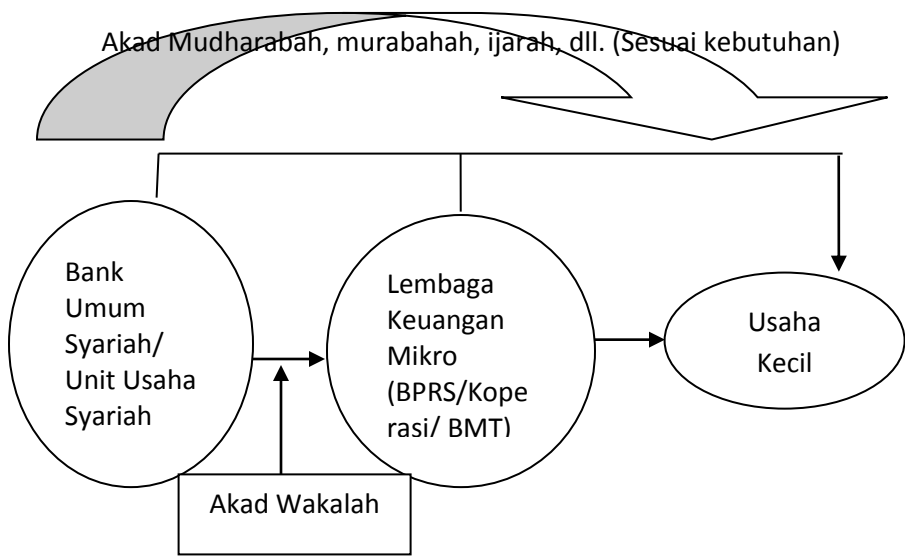
¹⁹Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 12.

²⁰Hamidah, "Analisis Kebijakan *Linkage Program*", 190

²¹Nurul Huda, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2012, 292.

upah/*fee* yang besarnya disepakati antara BUS/UUS dengan LKM. Dalam beberapa literatur, disebutkan akad *wakalah* pada umumnya dipergunakan sebagai akad yang membantu dalam pelaksanaan akad utama. *Channeling* menggunakan akad *wakalah* dalam penandatanganan perjanjian kerja samanya. Sedangkan skim pembiayaannya mengikuti transaksi yang dilakukan, yaitu bisa *wakalah wa al-mudharabah /musyarakah/ murabahah/ ijarah*.²²

Pola *channeling* digambarkan pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Gambaran pola *channeling*.

²²Dapta, “Perbedaan Pola *Chaneling* dan *Executing*”, 257.

3. *Joint Financing*,

Joint financing merupakan pembiayaan bersama oleh bank umum dan koperasi/LKM terhadap anggota LKM/koperasi. Pencatatan *outstanding credit* bagian Bank Umum dan bagian koperasi sebesar porsi pembiayaan kepada anggota koperasi.

Pada peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, disebutkan model *linkage program joint financing* pola syariah sebagai berikut:

- 1) Risiko pembiayaan kepada anggota koperasi, apabila kegagalan pembiayaan karena kegagalan bisnis secara normal (*normal business loss*), maka risiko ditanggung bersama antara BUS/UUS dan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsinya;
- 2) Distribusi pendapatan :
 - a. BUS/UUS memperoleh pendapatan dari *nisbah* bagi hasil/*margin* yang disepakati dengan UMK;
 - b. Pembagian pendapatan antara BUS/UUS dengan KJKS/UJKS-Koperasi sesuai dengan porsi yang disepakati;²³
- 3) Penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil/*margin* bagi anggota Koperasi, merupakan kesepakatan bersama dengan

²³ Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 12-13.

mempertimbangkan harga pasar untuk sektor/bidang usaha UMK yang dibiayai;

- 4) Jaminan anggota Koperasi, sesuai Undang-undang Perbankan dan ketentuan perbankan yang berlaku;²⁴
- 5) Akad kredit kepada anggota Koperasi, dilakukan oleh KJKS/UJKS-Koperasi untuk dan atas nama BUS/UUS;
- 6) Jangka waktu proses persetujuan kredit dalam rangka *Linkage Program*, maksimal 1 (satu) bulan setelah data dan persyaratan lengkap dipenuhi.

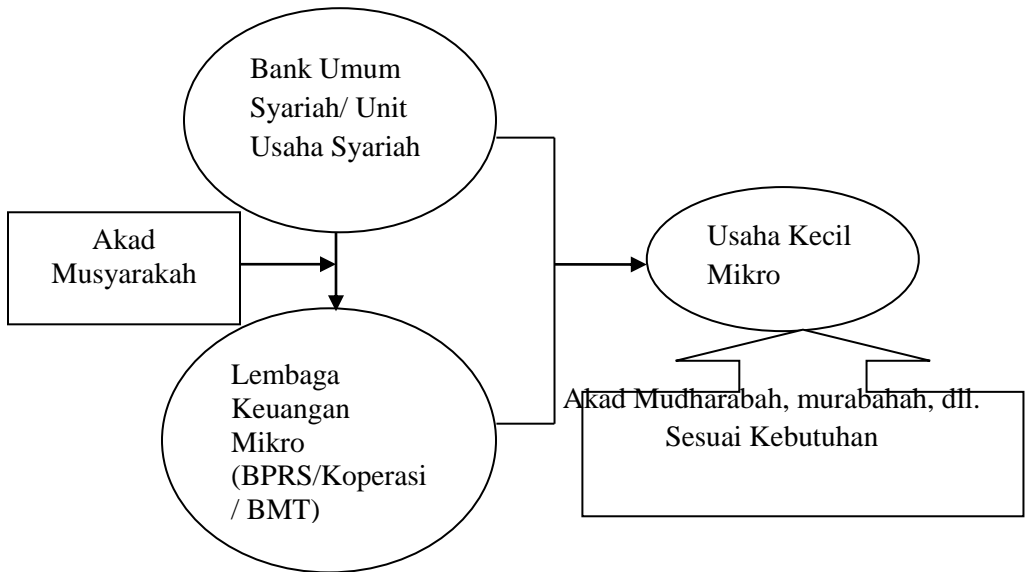
Pada pola ketiga yaitu *joint financing*, jenis akad yang dipergunakan adalah *musyarakah* atau *Joint Venture Profit Sharing*. Melalui kontrak ini, dua pihak atau lebih (dalam hal ini adalah BUS/UUS dan LKM) mengumpulkan modal untuk membiayai UKM.

Dalam PBI No. 7/46/PBI/2005 disebutkan *Musyarakah* adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing.²⁵ Berikut adalah skema kontrak ketiga.

²⁴Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi, 13.

²⁵Hamidah, “Analisis Kebijakan *Linkage Program*, hal. 191.

Pola *joint financing* digambarkan pada gambar 2.3



Gambar 2.3. Gambaran Pola *Joint Financing*

B. Akad Mudharabah

1. Definisi Akad Mudharabah

Secara etimologi, mudharabah berasal dari bahasa Arab yaitu kata dharb (ضرب) yang berarti memukul atau berjalan.²⁶

Orang yang bekerja keras disamakan dengan orang yang memukulkan tangan atau kakinya dalam menjalankan usaha

²⁶Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah-Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Pranada Medi/a Group, 2012), 367.

untuk mencari karunia Allah.²⁷ Suatu kontrak disebut mudharabah, karena pekerja (*mudharib*) biasanya membutuhkan suatu perjalanan untuk menjalankan bisnis.

Sedangkan perjalanan dalam bahasa Arab disebut juga *dharb fil Ardhi* (ضرب في الأرض) tepatnya dalam Alqur'an yaitu يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ²⁸ yang artinya mereka berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Oleh karena pekerjaan dan perjalanannya, mudharib menjadi berhak atas sebagian keuntungan usaha.²⁹

Mudharabah disebut juga *al-qiradh*. Mudharabah adalah istilah yang biasa digunakan oleh orang Irak sedangkan orang Hijaz membahasakannya dengan kata *al-qardhu* atau *qiradh*. Secara istilah, dua kata tersebut mengandung arti yang sama. *Qiradh* dengan huruf *Qaf* yang dikasrahkan diambil dari kata *al-qardhu* yang berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangan dan memperoleh sebagian keuntungannya. *Qiradh* bisa juga diambil dari kata *muqaradhah* yang berarti *al-musaawah* (kesamaan)

²⁷Manan, “*Hukum Ekonomi Syariah-Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*”, 367. Lihat juga Muhammad , *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2004), 36.

²⁸Dini Firmansyah, “Peranan Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Manfaat”, (Universitas Islam Negeri Ampel, 2014), 22.

²⁹Mervyn K Lewis dan Lativa M. Algaoun, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, terj. Burhan Wirasubrata, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2004), 67.

karena pemilik modal dan pengusaha memiliki hak yang sama terhadap laba.³⁰

Secara istilah, para ulama mengartikan mudharabah dengan redaksi yang berbeda, namun substansinya sama yaitu suatu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shaahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama. Mudharabah adalah penyerahan harta dari pemilik modal kepada pengelola untuk digolangkan, keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan yang telah disepakati, sedangkan kerugian hanya ditanggung pemilik modal. Pengelola tidak menanggung kerugian material karena ia telah menanggung kerugian lain berupa tenaga dan waktu.³¹

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama adalah pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola modal (*mudharib*), dengan syarat bahwa hasil keuntungan yang diperoleh akan dibagi untuk kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan bersama (nisbah yang telah disepakati), namun bila terjadi kerugian akan ditanggung *shahibul maal*.

³⁰Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 66.

³¹Neneng Nur Hasanah, “*Mudharabah dalam Teori*”, 67. Lihat juga Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128.

Dalam mudharabah, satu pihak memberikan kontribusi permodalan dan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan yang dapat berupa tenaga, pikiran/ide, dan manajemen. Oleh karena itu, pihak pertama disebut *sahibul maal* (*financier*), sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* (entrepreneur).

Nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola harus disepakati di awal perjanjian. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam syari'ah, namun tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Sangat variatif bahkan bisa 99:1. Namun yang tidak diperbolehkan oleh para ahli fiqih adalah 100:0.³²

Keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Diperbolehkan juga untuk menentukan proporsi yang berbeda untuk situasi yang berbeda. Misalnya, jika pengelola berusaha di bidang produksi, maka nisbahnya 50 persen, sedangkan kalau pengelola berusaha di bidang perdagangan maka nisbahnya 40 persen. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan

³²Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: The Internasional Institute of Islamic Thought (IIIT), 2003), 185.

akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³³

2. Dalil Alquran dan Hadits

Dalil Alquran yang menjadi landasan akad mudharabah adalah QS. Al- Muzammil ayat 20³⁴:

...فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضًى
وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَحْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٢٠

“....., karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah,...”

Yang dimaksud *mudharib* adalah orang yang berjalan (bepergian) di muka bumi untuk mencari karunia Allah.

Sebagaimana firman-Nya pula pada QS Al-Baqarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ
فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ
لَمِنَ الضَّالِّينَ ١٩٨

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang

³³Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), 243.

³⁴Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 575.

ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”

Dalam hadis juga dijelaskan, bahwa:

عن صالح طهيب, عن أبيه , قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
ثلاث فيهنّ البركة, البيع الى أجل, والمقارضة, وأخلاط البئر با لشعير,
للبيت لا للبيع.³⁵

“Ada tiga hal yang mengandung barakah:., jual beli tidak secara tunai (tangguh), muqaradhah/mudharabah (memberi modal kepada orang lain)³⁶, mencampur gandum dengan jewawut (tepung) untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR.Ibnu Majah).³⁷

Selain itu, dari segi sunnah, para fuqaha bersandar pada preseden dari perjanjian mudharabah yang ditandatangani nabi Muhammad dengan Khadijah sebelum pernikahannya. Dalam praktik mudharabah antara Khadijah dengan Nabi saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad ke luar negeri yakni ke Syiria. Pada kasus tersebut, Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al-maal*) sedangkan Nabi Muhammad berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).³⁸

³⁵Imam Ibnu Maajah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al.. “*Sunan Ibnu Maajah Juz 2*” (Daar al-Hadits Al-Qaahirah, 2010), 314.

³⁶Sugeng Widodo, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatif*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 137.

³⁷Huda, Nurul, dkk. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 54.

³⁸Adiwarman Karim, “*Bank Islam: Analisis*”,180.

Dalam prinsip mudharabah pada bank, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah maka bank bertanggungjawab atas kerugian yang mungkin terjadi.³⁹

Ulama membagi akad mudharabah menjadi dua macam, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Yaitu penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat dan pembatasan. Pemilik dana memberikan keleluasan penuh kepada pengelola untuk menggunakan dana dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan.⁴⁰ Penyelenggara usaha memiliki kebebasan dalam menggunakan modal yang dipercayakan oleh pemodal kepada penyelenggara usaha.

Kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharaiib* cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, daerah bisnis, atau yang lainnya.⁴¹ Pada bank, tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang

³⁹Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 31.

⁴⁰Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, 19.

⁴¹Huda, Nurul, dkk. "Lembaga Keuangan Islam", 77.

telah terhimpun.⁴² Para ahli ekonomi, dalam bahasa Inggris menyebut mudharabah mutlaqah dengan *Unrestricted Investment Account* (URIA).⁴³

Sesuai dengan kesepakatan, penyelenggara usaha mempunyai hak, sebagai berikut:

- 1) Ia memiliki hak untuk menyertakan modal ke bisnis lain.
- 2) Ia memiliki hak untuk memperoleh modal dari partner lain atau ketiga untuk ditanamkan pada bisnis *mudharabah*.
- 3) Ia punya hak untuk bekerja sama dengan *partner* ketiga.
- 4) Ia berhak membeli barang secara kredit.
- 5) Ia berhak menjual produk yang dihasilkan secara kredit
- 6) Ia berhak memberikan modal pemilik kepada pihak ketiga dalam rangka melaksanakan bisnis mudharabah ini.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah Muqayyadah merupakan penyerahan modal dengan syarat dan batasan tertentu. Penyelenggara usaha hanya mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal. *Shahibul mal* membatasi jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Dalam istilah ekonomi Islam modern, jenis mudharabah ini disebut *Restricted Investment Account*.⁴⁴

⁴²Muhamad, “*Manajemen Dana Bank*”, 31.

⁴³Huda, Nurul, dkk. “*Lembaga Keuangan Islam*”, 77.

⁴⁴Huda, Nurul, dkk. “*Lembaga Keuangan Islam*”, 77.

Misalnya komoditas yang diusahakan hanya komoditas tertentu saja yang sudah disepakati, tidak boleh menyelenggarakan komoditas atau usaha lain, harus membeli barang atau sumber daya ekonomi di tempat atau partner tertentu dan tak boleh di tempat lain, dan lainnya.

C. Profit Prespektif Ekonomi Islam

1. Definisi Profit/Laba

Pengertian laba secara operasional merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.⁴⁵

Harahap menyatakan bahwa laba adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntansi. Sedangkan Nafarin menyebutkan bahwa profit/laba adalah perbedaan antara pendapatan dengan keseimbangan biaya-biaya dan pengeluaran untuk periode tertentu.⁴⁶

Sedangkan Supomo menyatakan bahwa profit/laba merupakan pusat pertanggungjawaban yang masukan dan keluarannya diukur dengan menghitung selisih antara pendapatan dan biaya. Dikuatkan dengan pendapat Kuswadi

⁴⁵<http://repository.usu.ac.id/br>

⁴⁶M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 788.

yang menyatakan bahwa perhitungan laba diperoleh dari pendapatan dikurangi semua biaya.⁴⁷

Sementara pengertian laba yang dianut oleh struktur akuntansi sekarang ini adalah selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak.

2. Profit/Laba dalam Perspektif Islam

Ekonomi syariah mengakui adanya profit/laba/keuntungan (*al-ribhu*) dalam bisnis. Keuntungan bisnis dalam pandangan para ulama disimpulkan sebagai hasil dari suatu usaha (*al-'amal*) dan modal (*ra's al-mal*).⁴⁸ Peranan usaha dan kerja menjadi sangat penting untuk meraih keuntungan.

Dasar hukum yang menjadi dasar diperbolehkannya mengambil keuntungan adalah Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تَجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ١٦

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.”

⁴⁷Kuswadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005), 135.

⁴⁸<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, *Landasan Teori*, 26.

Selain itu Allah juga berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تَجْرَةً لَّن تَبُورَ ٢٩

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi(QS. Faatir: 29)⁴⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلَّكُمْ عَلَىٰ تَجْرَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ١٠

“Hai orang-orang yang beriman, sukaakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?” (QS. Ash-Shaff:10)

Laba dalam Islam tidak hanya berpatokan pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba melainkan jugakualitas. Lebih komprehensif dibanding keuntungan secara kuantitas yakni laba dapat berarti, hasil dari *bersabar*, *mensucikan diri*, *beriman*, *berdakwah*, *berittibā'*, *berinfaq*, dan laba adalah *hidāyah dari Alloh*. Semua terakumulasikan dalam *jannah* dan *kebahagian kekal di akhirat*. Inilah makna laba yang menjadi orientasi dasar dalam konsep teori laba ekonomi Islam.⁵⁰

Menurut para ulama tafsir dan fiqh, dapat disimpulkan bahwa laba adalah kelebihan dari modal dan atau kelebihan dari

⁴⁹Al-Hikmah Alquran dan Terjemahnya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), 437.

⁵⁰Fachri Fachrudin, *Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'āmalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)*, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 70.

modal serta beban-beban biaya sebagai akibat dari aktivitas bisnis. Laba dihasilkan dari dua unsur utama, yaitu usaha (*al-a'mal*) dan modal (*ra'sul mal*).

Seandainya laba diperoleh bukan dari hasil dua unsur tersebut, maka ia bukanlah dinamakan keuntungan. Sebagaimana praktik membungakan uang (*ribawi*), ekonomi Islam tidak menganggap hasil dari praktik membungakan uang sebagai keuntungan.⁵¹

Sebagaimana Allah berfirman dalam Alquran Surat Ar-Ekonomi Islam memandang keuntungan dalam bisnis tidak hanya berupa profit (laba) yang bersifat materi saja, namun ada juga pandangan tentang keuntungan non materi yaitu berupa benefit, yang diterjemahkan dengan keberkahan. Sehingga dirumuskan bahwa laba ditambah keberkahan akan menghasilkan maslahat, yakni kesuksesan di dunia dan akhirat.⁵²

Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا
آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”. (QS. Ar-Rum:39)

⁵¹<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, Landasan Teori, 27

⁵²<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, Landasan Teori, 27.

Sedangkan hadits tentang konsep laba adalah

عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي
لَهُ بِهِ شَاةً فَأَشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ
وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

“Dari Urwah al Bariqi, bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam memberinya satu dinar uang untuk membeli seekor kambing. Dengan uang satu dinar tersebut, dia membeli dua ekor kambing dan kemudian menjual kembali seekor kambing seekor satu dinar. Selanjutnya dia datang menemui nabi Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. (Melihat hal ini) Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam mendoakan keberkahan pada perniagaan sahabat Urwah, sehingga seandainya ia membeli debu, niscaya ia mendapatkan laba darinya.” (HR. Bukhari, no. 3443)

Implementasi konsep laba dalam Islam adalah semua pebisnis dalam menjalankan usaha akan selalu menjaga diri dari perbuatan tercela, tidak amanah, penipuan, pengrusakan lingkungan, dan perbuatan tercela lainnya yang dilarang syariah. Keuntungan yang didapat pun tidak akan terakumulasi pada diri mereka sendiri melainkan terdistribusi secara proporsional juga kepada masyarakat kurang mampu.

Dalam jangka panjang, penerapan konsep laba ini akan mengarah pada terciptanya suatu tatanan kehidupan ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan, tatanan kehidupan sosial yang saling menghargai, menghormati dan tolong menolong di antara seluruh masyarakat.⁵³

⁵³Fachri Fachrudin, “Kajian Teori Laba pada Transaksi”, 73-74.

3. Jenis-Jenis Profit

Jenis-jenis laba / profit, antara lain :

- a) Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
- b) Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.⁵⁴

Dasar-dasar pengukuran laba menurut Islam:

- a) *Taqlib* dan *Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko) Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual dan membeli, atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan syar'i. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau resiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan menimbulkan pengurangan modal pada suatu putaran dan penambahan pada putaran lain.
- b) *Muqabalah*, yaitu perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada awal periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada akhir itu dengan nilai barang yang ada

⁵⁴Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2011), 303.

pada awal periode yang sama. Juga bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan).

- c) Keutuhan modal pokok, yaitu laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi.
- d) Laba dari produksi. Hakikatnya dengan Jual Beli dan Pendistribusian, yaitu Pertambahan yang terjadi pada harta selama setahun dari semua aktivitas penjualan dan pembelian, atau memproduksi dan menjual yaitu dengan pergantian barang menjadi uang dan pergantian uang menjadi barang dan seterusnya, maka barang yang belum terjual pada akhir tahun juga mencakup pertambahan yang menunjukkan perbedaan antara harga yang pertama dan nilai harga yang sedang berlaku.
- e) Penghitungan nilai barang di akhir tahun. Tujuan penilaian sisa barang yang belum sempat terjual di akhir tahun adalah untuk penghitungan zakat atau untuk menyiapkan neraca-neraca keuangan yang didasarkan pada nilai penjualan yang berlaku di akhir tahun itu, serta dilengkapi dengan daftar biaya-biaya pembelian dan pendistribusian. Dengan cara ini,

tampaklah perbedaan antara harga yang pertama dan nilai yang berlaku yang dapat dianggap sebagai laba abstrak.⁵⁵

Dengan prinsip dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam kaidah mu'amalah, laba dalam islam tidak hanya berpatokan hanya pada bagaimana memaksimalkan nilai kuantitas laba tersebut. Akan tetapi juga menyelaraskannya dengan nilai kualitas yang diharapkan secara fitrah kemanusiaan dan Islam.

Setiap laba yang dihasilkan melalui melalui sumber yang diharamkan atau proses transaksi bisnis yang ilegal tidak diakui oleh syari'ah. Hal ini bisa dilihat melalui model-model bisnis yang dikembangkan oleh Rasulullah dalam meraih laba yang bernilai materil serta keberkahan.⁵⁶

Perbandingan yang tepat atas pendapatan dan biaya tergambar dalam laporan laba rugi. Penyajian laba melalui laporan tersebut merupakan fokus kinerja perusahaan yang penting. Kinerja perusahaan merupakan hasil dari serangkaian proses dengan mengorbankan berbagai sumber daya. Adapun salah satu parameter penilaian kinerja perusahaan tersebut adalah pertumbuhan laba.

⁵⁵<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>

⁵⁶Fachri Fachrudin, "Kajian Teori Laba pada Transaksi", 71-72.

Pertumbuhan laba dihitung dengan cara mengurangkan laba periode sekarang dengan laba periode sebelumnya kemudian dibagi dengan laba pada periode sebelumnya.

$$\text{Pertumbuhan Laba} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t - \text{Laba bersih tahun } t-1}{\text{Laba bersih tahun } t-1}$$

Sedangkan laba dihitung dengan cara pendapatan dikurangi beban atau biaya.

$$\text{Laba} = \text{Keuntungan} - \text{Beban/Biaya}$$

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*).

Controlable factors adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya.

Uncontrolable factors atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal tetapi mereka dapat membangun

fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.⁵⁷

4. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba

Pertumbuhan laba dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁵⁸

- a. Besarnya perusahaan. Semakin besar suatu perusahaan, maka ketepatan pertumbuhan laba yang diharapkan semakin tinggi.
- b. Umur perusahaan. Perusahaan yang baru berdiri kurang memiliki pengalaman dalam meningkatkan laba, sehingga ketepatannya masih rendah.
- c. Tingkat leverage. Bila perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi, maka manajer cenderung memanipulasi laba sehingga dapat mengurangi ketepatan pertumbuhan laba.
- d. Tingkat penjualan. Tingkat penjualan di masa lalu yang tinggi, semakin tinggi tingkat penjualan di masa yang akan datang sehingga pertumbuhan laba semakin tinggi.
- e. Perubahan laba masa lalu. Semakin besar perubahan laba masa lalu, semakin tidak pasti laba yang diperoleh di masa mendatang.

⁵⁷Zainul rifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), 59.

⁵⁸<http://repo.iain-tulungagung.ac.id>, *Landasan Teori*, 25-26.

BAB III

Gambaran Umum BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang

A. Gambaran Umum BMT Bina Ummat Sejahtera Lasem

1) Berdirinya BMT BUS Lasem

Koperasi Jasa Keuangan Syariah *Baitul Maal wa Tamwil* (KJKS-BMT) Bina Ummat Sejahtera (BUS) diinisiasi dan diprakarsai oleh pengurus Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Organisasi Satuan (Orsat) Rembang dan didirikan pada tanggal 10 November 1996, bertempat di daerah pesisir Utara Jawa. Di antara nelayan-nelayan kecil di Lasem.¹

Setelah terbentuk organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Kabupaten Rembang, oleh beberapa tokoh masyarakat dan agama, pada 1995 dibentuklah organisasi baru yang bernama PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil). Organisasi ini mencoba menjembatani pemikiran ICMI waktu itu dalam pendirian sebuah lembaga keuangan mikro syariah.²

Pemrakarsa berdirinya KJKS BMT adalah Drs. Abdullah Yazid MM.yang berhasil menggerakkan lebih dari 20 para pendiri dengan mengumpulkan modal awal Rp. 10 juta. Pada tahun 2011, BMT Bina Ummat Sejahtera memiliki Rp.

¹Hasil wawancara dengan narasumber Wiwik Purwanti (sekretaris dirut BMT BUS) pada 14 Januari 2019

²<http://eprints.walisongo.ac.id/pdf>. Diakses pada 5 Maret 2019

133 milyar aset. Dalam perkembangan KJKS yang selanjutnya disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT BUS Lasem membuktikan bisa disejajarkan dengan koperasi-koperasi syariah terbesar di Indonesia. Untuk tahun 2016 KPPS BMT BUS Lasem memiliki aset sebesar Rp 750 miliar dan jumlah kantor layanan berjumlah 117 yang tersebar di tujuh provinsi di Indonesia.³

Sampai saat ini BMT Bina Ummat Sejahtera wilayah Jawa Tengah memiliki kantor cabang sebanyak 54 unit, di wilayah Yogyakarta sebanyak 3 unit, di wilayah Jawa Timur sebanyak 10 unit, di wilayah Jakarta sebanyak 2 unit, dan bertambah lagi di wilayah Pontianak 1 unit.

2) Profil BMT BUS

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah BMT “Bina Ummat Sejahtera” (selanjutnya disebut KSPPS BMT BUS) berdiri pada tanggal 10 November 1996 dan Anggaran Dasarnya disahkan oleh Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah melalui Surat Keputusan Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 tanggal 31 Maret 1998 dengan nama Koperasi Serba Usaha Bina Ummat Sejahtera (KSU BUS), dengan wilayah kerja awalnya hanya Kabupaten

³<http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/16/08/24/ocp026-bmt-lasem-kembangkan-core-banking> didownload pada 25 April 2019.

Rembang. Namun saat ini wilayah kerja BMT BUS sudah meliputi seluruh wilayah Indonesia.⁴

Dalam perjalanannya, Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Bina Ummat Sejahtera telah mengalami beberapa Perubahan Anggaran Dasar, yaitu sebagai berikut :

Pertama, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tentang⁵ perubahan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bina Ummat Sejahtera (KSPS –BUS) dan perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah.⁶

Kedua, Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK.11/IV/2006 tanggal 4 April 2006 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Liembang Priyadi Daljono, SH. yang berkedudukan di Blora tentang perubahan dari

⁴<https://www.bmtbus.co.id/profil/> diakses pada 19 Mei 2019.

⁵Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar.

⁶Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 03/BH/PAD/KDK.11/VII/2002 tanggal 1 Juli 2002 Tentang Akta Perubahan Anggaran Dasar.

Koperasi Simpan Pinjam menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah Bina Ummat Sejahtera (KJKS BUS).⁷

Ketiga, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 yang mengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 26 Pebruari 2014 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Rembang tentang perubahan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPS BMT BUS).⁸

Serta tentang perubahan wilayah kerja menjadi meliputi seluruh wilayah Nasional Indonesia yang merupakan gabungan dari KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jawa Tengah, KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Yogyakarta dan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Jakarta.⁹

Keempat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

⁷Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 04/PAD/KDK.11/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 120 tanggal 30 Januari 2006 oleh Notaris Liembang Priyadi Daljono, SH.

⁸Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 188/PAD/M.KUKM.2/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 tentang pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 55 tanggal 26 Pebruari 2014 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn.

⁹Wawancara dengan Nadia pengurus BMT BUS Lasem pada 21 Desember 2018.

216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 yang mengesahkan 2Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn. yang berkedudukan di Rembang tentang perubahan dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (KSPPS BMT BUS).¹⁰

KSPPS BMT BUS beralamat di Jl. Untung Suropati No. 16 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Propinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan pasal 4 Anggaran Dasar, Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan ummat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

KSPPS BMT BUS menyelenggarakan kegiatan usaha Keuangan, Persewaan dan Jasa serta mengadakan kerjasama antar koperasi juga badan usaha lainnya untuk mencapai tujuan tersebut. Untuk memberikan kepuasan Anggota KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah meningkatkan mutu pelayanan dengan standar Internasional, hal ini dibuktikan dengan telah

¹⁰Company profile 2018 BMT BUS Lasem.

Lihat juga Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang pengesahkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Nomor 53 tanggal 21 Oktober 2015 oleh Notaris H. Muchamad Al Hilal, SH., M.Kn.

diterimanya sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 16 Februari 2007 dengan nomor ID07/0857.¹¹

Selain itu, untuk menyambut era digitalisasi, pada tahun 2016 BMT BUS telah menggunakan IT Core baru, sehingga seluruh cabang telah tersambung secara real time (*on line system*). Tidak itu saja, secara bertahap pengelola BMT BUS telah dilengkapi dengan mesin EDC untuk memudahkan transaksi anggota di lapangan. Meski belum di seluruh kantor cabang, penggunaan mesin ATM *on Us*, menjadi pelengkap BMT BUS menyambut era digitilisasi. Hasil dari pemanfaatan teknologi secara maksimal mulai dirasakan manfaatnya oleh pengelola dan juga anggota BMT BUS.¹²

Untuk itu, investasi di bidang IT akan terus dilakukan, mengingat juga pertumbuhan jumlah anggota tahun 2016 mencapai 10% dari 167.281 orang menjadi 182.736 orang. Semua ini dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota BMT BUS.

Secara garis besar produk – produk KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera terbagi menjadi dua bagian yaitu produk simpanan dan produk pembiayaan. Produk simpanan terdiri atas:

- a. Simpanan Sukarela Lancar (Si Relu)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat.

¹¹Company profile 2016 BMT BUS Lasem

¹²<http://eprints.walisongo.ac.id/pdf>. Diakses pada 5 Maret 2019.

b. Simpanan Sukarela Berjangka (Si Suka)

Simpanan berjangka dengan sistem setoran dapat dilakukan setiap saat dan pengambilannya disesuaikan dengan tanggal valuta. Jenis Simpanan Si Suka dapat digolongkan Si Suka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun.¹³

c. Simpanan Siswa Pendidikan (Si Sidik)

Simpanan yang dipersiapkan sebagai penunjang khusus untuk biaya pendidikan dengan cara penyetorannya setiap bulan dan pengambilannya pada saat siswa akan masuk Perguruan Tinggi.¹⁴

d. Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip *wadhiah yadh dhamanah* di mana atas ijin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip.

e. Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara)

Simpanan Ta'awun Sejahtera (Si Tara) merupakan produk simpanan dengan akad Mudharabah anggota sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai *mudharib* (*pelaksana/pengelola usaha*), atas kerjasama ini

¹³Data profil lembaga KSPPS BMT BUS Lasem. Bisa juga dilihat pada brosur BMT BUS Lasem.

¹⁴Hasil wawancara dengan narasumber Wiwik Purwanti (sekretaris dirut BMT BUS) pada 14 Mei 2018.

berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.¹⁵

Sedangkan produk pembiayaan/kredit terdiri atas:

a. Produk Pembiayaan/Kredit Pedagang

Sasaran pembiayaan / kredit ini dengan sistem angsuran harian, mingguan dan bulanan dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Produk Pembiayaan/Kredit Pertanian

Sasaran pembiayaan pertanian dititikberatkan pada modal tanam dan pemupukan, jumlah modal yang dibutuhkan disesuaikan dengan luas lahan garapan, pembiayaan ini dengan sistem musiman, atau jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.

c. Produk Pembiayaan/Kredit Nelayan

Jenis pembiayaan yang diperuntukkan bagi anggota nelayan, produk ini sangat fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anggota nelayan berupa pemupukan modal nelayan dan pengadaan sarana penangkapan ikan, dengan sistem angsuran yang telah ditentukan oleh KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan Mudharib.¹⁶

¹⁵<https://www.bmtbus.co.id/program-unggulan/> diakses pada 23 Juni 2019.

¹⁶<https://www.bmtbus.co.id/program-unggulan/> diakses pada 23 Juni 2019

d. Produk Pembiayaan/Kredit Industri dan Jasa

Produk ini dikhususkan bagi para pengusaha yang bergerak dalam bidang pengembangan jasa, dan Industri, PNS melalui sistem angsuran ataupun jatuh tempo yang telah disepakati kedua belah pihak.¹⁷

3) Struktural Kepengurusan KSPPS BMT BUS Lasem

Berdasarkan pendaftaran pada Kementerian Koperasi dan UKM No.615/W.04/2016 tanggal 8 April 2016, maka susunan pengurus, pengawas dan pengawas syariah KSPPS BMT BUS adalah:

Pengurus:

Ketua : H. Abdullah Yazid

Sekretaris : Drs. H. Ahmad Zuhri, MM

Bendahara : Imam Prayoga

Pengawas :

Koordinator : Hj. Maryam Cholil

Anggota : H. Jumanto Purwo Sukarto, S.Pd, MM

Anggota : H. Minanul Ghoffar, ST, MM

Pengawas Syariah:

Koordinator : H. Mahmudi, S.Ag, M.SI

Anggota : H. Taufikur Rochman, BA

Anggota : H.M. Anwar Sa'id

¹⁷Hasil wawancara dengan narasumber Wiwik Purwanti (sekretaris dirut BMT BUS) pada 14 Mei 2018. Lihat juga di BMT BUS profile.

Dewan Direksi:

Direktur Utama : Fathorrahman

Direktur Kepatuhan : M. Anshori

Direktur Baitul Maal : Rokhmad

Direktur Bisnis : Zul Akmal Syafe'i

Direktur Operasi dan Keuangan : Agus Setyo Pramono¹⁸

4) Laporan Keuangan BMT BUS Lasem tahun 2017 dan 2018

a. Laporan keuangan BMT BUS 2017

Gambar di lampiran halaman 125.

Sumber: Data laporan keuangan tahunan BMT BUS Lasem 2017.

Pada laporan keuangan tahunan periode 2017 yang penulis peroleh dari pihak BMT BUS Lasem, disebutkan bahwa kewajiban jangka panjang yang berarti hutang dana dari beberapa bank umum syariah yaitu Panin Bank Syariah sebesar 3,404,031,054, BNI Syariah 66, 650, 303, 436, Dana LPDB sebesar 3,888,860,000, DKI Syariah 10,000,000,000, Bank Jateng Syariah 38, 109, 211, 323, Bank Jabar Banten SY 12, 488,141, 056, BRI Syariah sebesar 9,272, 764, 052, dan Bahana Artha Ventura senilai 10,000,000,000.¹⁹

¹⁸Data bersumber dari sekretaris BMT BUS Lasem .

¹⁹Diambil dari data laporan keuangan KSSPPS BMT BUS Lasem tahun 2017.

b. Laporan keuangan BMT BUS 2018.

Gambar di lampiran halaman 126.

Sumber: Data laporan keuangan tahunan BMT BUS Lasem 2017.

Pada laporan keuangan tahunan periode 2017 yang penulis peroleh dari pihak BMT BUS Lasem, disebutkan bahwa kewajiban jangka panjang yang berarti hutang dana dari beberapa bank umum syariah yaitu BNI Syariah sebesar 73.460.053.236, Bank DKI Syariah 6.666.666.664, Bank Jateng Syariah 57.129.332850, Bank Jabar Banten syariah sebanyak 15.630.188.910, BRI Syariah senilai 10.213.638.979, Bahana Artha Ventura sebesar 36.363.931.501, Bank Muamalat indonesia 7.748.936.442.

c. Sebaran pembiayaan per produk BMT BUS Lasem tahun 2017 dan 2018

Sebaran pembiayaan BMT BUS Lasem tahun 2017 dan 2018 dijelaskan pada tabel 3.1.

Sebaran Pembiayaan per Produk				
Per Desember 2017				
No	Jenis Produk	Out Standing Des 2017	NPF	%
1	Mudharabah	323.220.692.819	7.503.864.584	2,32%
2	Murabahah	265.142.449.869	7.890.756.696	2,98%
3	Piutang Lainnya	10.082.872.529	-	0,00%
JUMLAH		598.446.015.217	15.394.621.280	2,57%
Per Desember 2018				
No	Jenis Produk	Out Standing Des 2018	NPF	%
1	Mudharabah	452.817.757.268	10.188.399.539	2,25%
2	Murabahah	255.915.492.614	6.823.174.148	2,67%
3	Piutang Lainnya	7.912.876.765	-	0,00%
JUMLAH		716.646.126.647	17.011.573.687	2,37%
Pendapatan Operasional				
	2018	2017		
Pendapatan Mudharabah	99.237.071.328	70.034.300.950		
Pendapatan Murabahah	23.232.599.345	26.293.589.509		
Pendapatan Bai' Bitsaman Ajil	3.539.609.909	686.800.583		
JUMLAH	126.009.280.582	97.014.691.041		

Tabel 3.1. Sebaran Pembiayaan per Produk BMT BUS Lasem per Desember 2017 dan 2018.

Tabel diambil dari laporan sebaran pembiayaan per produk BMT BUS Lasem per Desember 2017 dan 2018.

Berdasarkan laporan keuangan dan data sebaran pembiayaan BMT BUS Lasem dapat disimpulkan bahwa akad pembiayaan yang paling banyak digunakan BMT BUS Lasem

adalah akad mudharabah. BMT melakukan *outstanding* terbanyak, terhitung 323.220.692.819 pada tahun 2017 meningkat menjadi 452.817.757.268 pada tahun 2018.²⁰

Pendapatan operasional dari mudharabah pun mengalami peningkatan dari 70.034.300.950 menjadi 99.237.071.328. Itu paling banyak di antara pendapatan operasional dengan pembiayaan yang lain yakni *murabahah* dan *bai' bitsaman ajil*.

B. Gambaran Umum BRI Syariah Cabang Semarang

1) Berdirinya BRI Syariah Cabang Semarang

Berawal dari akuisisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. terhadap Bank Jasa Arta pada tanggal 19 Desember 2007 dan berdasarkan izin Bank Indonesia tanggal 16 Oktober 2008 melalui surat No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi sekaligus mengubah kegiatan usahanya dari sebuah bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam.²¹

Posisi PT. Bank BRI Syariah semakin kokoh ketika pada tanggal 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan (spin off) Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan kemudian

²⁰Sebaran pembiayaan BMT BUS Lasem tahun 2017 dan 2018.

²¹Data diperoleh dari Profil BRI Syariah Cabang Semarang. Wawancara juga dengan Adhi D.S (selaku *branch admin* atau sekretaris BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 26 Juli 2019.

melebur ke dalam PT Bank BRI Syariah berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan akta dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah. Saham PT Bank BRI Syariah dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan Yayasan Kesejahteraan Pekerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Mencanangkan visi untuk menjadi bank ritel modern, PT Bank BRI Syariah melakukan berbagai strategi pengembangan dan penjualan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan nasabah. Kantor cabang yang representatif dibuka di berbagai kota besar dan strategis di seluruh Indonesia demi memberikan layanan yang mudah dijangkau nasabah. Logo PT Bank BRI Syariah dengan pendar cahaya benar-benar menjadi acuan perusahaan dalam mengembangkan usahanya sehingga PT Bank BRI Syariah menjadi bank yang dituju karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan nasabah.²²

Sejak tahun 2010 PT Bank BRI Syariah berhasil mendudukkan diri sebagai bank syariah ketiga terbesar dari sisi aset di Indonesia. Karim Consulting Indonesia memberikan penghargaan Islamic Finance Award kepada PT Bank BRI

²²Data diperoleh dari Profil BRI Syariah Cabang Semarang. Wawancara juga dengan Adhi D.S (selaku baranch Admin atau sekretaris BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 26 Juli 2019.

Syariah sebagai *The 3rd Rank Full Fledged Sharia Bank in Indonesia* pada tahun 2010. Dari institusi yang sama, pada tahun 2011 PT Bank BRI Syariah memperoleh penghargaan sebagai *The 2nd Rank The Most Expansive Islamic Bank*. Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia – Indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah Pertama yang Memiliki Layanan Mobile Banking di 4 Toko Online dan sebagai Philantrophy Pertama di Indonesia yang Menggunakan ATM dalam Penyaluran Kepada Binaan.

Penghargaan lain diberikan oleh Majalah SWA yaitu penghargaan Indonesia Original Brands 2012 untuk kategori produk bank syariah dan Inventure Award 2013 sebagai *The Indonesia Middle Class Brand Champion 2013* untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima PT Bank BRI Syariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional syariah.²³

Secara konsisten PT Bank BRI Syariah terus mengembangkan berbagai strategi dan inisiatif untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha perusahaan. Salah satunya adalah membangun kerjasama strategis dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dalam bentuk memanfaatkan

²³Data diperoleh dari Profil BRI Syariah Cabang Semarang. Wawancara juga dengan Adhi D.S (selaku baranch Admin atau sekretaris BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 26 Juli 2019.

jaringan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. untuk membangun kantor layanan syariah perusahaan yang berfokus pada kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Pada tahun 2013, PT Bank BRI Syariah merintis usaha dalam upaya meningkatkan status bank sebagai bank devisa untuk direalisasikan pada tahun 2014 sesuai izin Bank Indonesia No.15/2272/Dpbs.

2) Profil BRI Syariah Cabang Semarang

PT BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Semarang terletak di jalan MT. Haryono no 655 A Rt. 01 Rw. 12 Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang Jawa Tengah 50137 telp. (024) 8317000. BRI Syariah Kantor Cabang (KC) Semarang Memiliki 7 Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang tersebar di Ungaran, Pati, Kudus, Demak, Kendal dan Purwodadi.

BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Semarang Majapahit terletak di jalan Brigjend Sudiarto No. 234 Semarang 50198 telp. (024) 76747793, KCP Ungaran Diponegoro terletak di Ruko Ungaran Square No. 3 jalan Diponegoro 745 Semarang 50511 telp. (024) 6925959. KCP Kudus Ahmad Yani terletak di jalan Ahmad Yani 125B-3, B-4, Ruko Kereta Api Indonesia Kudus 59311 telp. (0291) 439474.²⁴

²⁴Data diperoleh dari Profil BRI Syariah Cabang Semarang. Wawancara juga dengan Adhi D.S (selaku baranch Admin atau sekretaris BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 26 Juli 2019.

KCP Pati Diponegoro berada di jalan Diponegoro No. 65 Pati 59112 telp. (0295) 383694. KCP Demak Sultan Fattah berada di jalan Sultan Fattah No. 37 Demak 59511 telp. (0291) 682293. KCP Kendal Weleri berada di jalan Utama Barat No. 230 Kendal 51355 telp. (0294) 641006. KCP Purwodadi Ahmad Yani berada di jalan Ahmad Yani No. 41Grobogan 58111 telp. (0292) 421099.²⁵

3) Struktural Kepengurusan BRI Syariah Cabang Semarang

Struktur Organisasi Kantor Cabng Semarang per Agustus 2019²⁶

Pemimpin Cabang	: Pepep Muslim Wahid
Financing Review Manager	: Radityia Hadiansyah Micro
Marketing Manager	: Indra Lesksmana, Sulistiaji
Marketing Manger	: Yuni H
Operation&Sevice Manager	: Afrida Kusumawati
Financing Support Manger	: Neindar Yogo S
Pincapem	: All KCP
Unit Head	: Rachman Budi S, Fredy Sico Putra
AOM NPF	: Dodi Ludce W
Account Officer	: Dhian Tri R, Edwin SW, Muis, Faezal R, Iman P, Ade

²⁵Data diambil dari profil BRI Syariah Cabang Semarang.

²⁶Data diperoleh dari Profil BRI Syariah Cabang Semarang. Wawancara juga dengan Adhi D.S (selaku baranch Admin atau sekretaris BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 26 Juli 2019.

	Ikhwan InOVA Satria D.U, Istu Putra W
AOM	: Ira Lelita, Awan E, Dian Bagus P, Bambang P,
Branch Ops Supervisor	: Nia Andelia
Teller	: Tamia DM, Eine SA
Kepala Kantor Kas	: Vacant
General Affair	: A. Mujtahid
AO NPF	: Masgunarto A
FRO	: Mirna S, Dian K.P
Customer Service	: Kinanda, Rayza, Ayunda
Back Office	: Agus Kurnia
Loan Ops	: Kartika A
Branch Admin	: Adhi D. S
Residen Auditor	: Yusuf Suwandi, Sofia D
Penaksir Emas	: Ridho Adi N
ADP	: Dio Wibi
Area Support	: Arfianti M.S ²⁷

²⁷Data diperoleh dari Profil BRI Syariah Cabang Semarang. Wawancara juga dengan Adhi D.S (selaku baranch Admin atau sekretaris BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 26 Juli 2019.

4) Laporan Keuangan

a. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana PT Bank BRI Syariah Tbk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 dan 2016 (Dalam Jutaan Rupiah).

LAPORAN LABA-RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA			
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2017 & 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)			
POS-POS		31 Des 2017	31 Des 2016
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A.	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana		
1.	Pendapatan Penyaluran Dana	2,816,174	2,634,201
a.	Rupiah		
i.	Pendapatan dari piutang		
-	Murabahah	1.507.099	1.533.338
-	Istishna'	1.125	1.232
-	Ujrah	44.043	45.837
ii.	Pendapatan dari bagi hasil		
-	Mudharabah	141.919	167.105
-	Musarakah	528.286	526.506
iii.	Lainnya	593.702	360.183
b.	Valuta Asing		
i.	Pendapatan dari piutang		
-	Murabahah	-	-
-	Istishna'	-	-
-	Ujrah	-	-
ii.	Pendapatan dari bagi hasil		
-	Mudharabah	-	-
-	Musarakah	-	-
iii.	Lainnya	-	-
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi +/-	1,180,598	1,035,501
a.	Rupiah		
-	Non profit sharing	1.180.598	1.035.501
-	Profit sharing	-	-
b.	Valuta asing		
-	Non profit sharing	-	-
-	Profit sharing	-	-
3.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1,635,576	1,598,700
B.	Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana		
1.	Pendapatan Operasional Lainnya	174,495	145,204

Tabel 3.2 Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017&2016.²⁸

²⁸Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017&2016

Terlihat dalam laporan keuangan tersebut pendapatan dari penyaluran dana yang menggunakan akad mudharabah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan. Yaitu 167, 105 juta menjadi 141, 919 juta.

b. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana PT Bank BRI Syariah Tbk periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Jutaan Rupiah).

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
Periode Laporan 1 Januari s/d 31 Desember 2018 dan 2017 (Dalam Jutaan Rupiah)			
No.	Pos - Pos	Individual	
		31 Des 2018	31 Des 2017
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			
A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan penyaluran dana	3.120.307	2.816.174
a.	Rupiah		
i.	Pendapatan dari piutang		
-	Murabahah	1.480.934	1.507.099
-	Istishna'	640	1.125
-	Ujrah	60.554	44.043
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil		
-	Mudharabah	84.102	141.919
-	Musarakah	640.468	528.286
iii.	Lainnya	844.029	593.702
b.	Valuta asing		
i.	Pendapatan dari piutang		
-	Murabahah	-	-
-	Istishna'	-	-
-	Ujrah	-	-
ii.	Pendapatan dari Bagi Hasil		
-	Mudharabah	-	-
-	Musarakah	-	-
iii.	Lainnya	9.580	-
2.	Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/-	1.247.462	1.180.598
a.	Rupiah		
i.	Non profit sharing	1.247.462	1.180.598
ii.	Profit sharing	-	-
b.	Valuta asing		
i.	Non profit sharing	-	-
ii.	Profit sharing	-	-
3.	Pendapatan setelah distribusi bagi hasil	1.872.845	1.635.576
B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana			
1.	Pendapatan operasional lainnya	528.444	174.495

Tabel 3.3 Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018&2017²⁹

Terlihat dalam laporan keuangan tersebut pendapatan dari penyaluran dana yang menggunakan akad mudharabah dari tahun 2017 ke 2018 mengalami penurunan juga. Yaitu 141, 919 juta menjadi 84, 102 juta.

²⁹Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018&2017

c. Laporan Rasio Keuangan Tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016

LAPORAN RASIO KEUANGAN			
Tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016			
RASIO		31 Des 2017	31 Des 2016
RASIO KINERJA			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	20,29%	20,63%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	4,02%	3,09%
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,37%	3,03%
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	2,04%	1,91%
5.	NPF gross	6,43%	4,57%
6.	NPF net	4,72%	3,19%
7.	Return On Assets (ROA)	0,51%	0,95%
8.	Return On Equity (ROE)	4,10%	7,40%
9.	Net Imbalan (NI)	5,84%	6,67%
10.	Net Operating Margin (NOM)	-0,12%	0,41%
11.	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,24%	91,33%
12.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	33,85%	36,96%
13.	Financing to Deposit Ratio (FDR)	71,87%	81,47%
KEPATUHAN (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPD		
	a.1. Pihak Terkait	-	-
	a.2. Pihak Tidak Terkait	-	-
	b. Persentase Pelampauan BMPD		
	b.1. Pihak Terkait	-	-
	b.2. Pihak Tidak Terkait	-	-
2.	GWM Rupiah		
	a. GWM rupiah	7,03%	5,02%
	b. GWM valuta asing	1,70%	1,13%
3.	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,34%	1,43%

Tabel 3.4 Laporan Rasio Keuangan, Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017&2016.³⁰

Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa pembiayaan bagi hasil terhadap pembiayaan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 dengan sistem bagi hasil mudharabah dan musyarakah. Yaitu 36, 96% menjadi 33,85 %.

³⁰Laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d .31 Desember 2017 dan 2016

NPF *gross* mengalami peningkatan yaitu 4,57% menjadi 6,43%. NPF *net* juga mengalami peningkatan dari 3,19% menjadi 4,72%. Namun, *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan yaitu 0,95% menjadi 0.51%. Sedangkan *Return On Equity* (ROE) juga mengalami penurunan dari 7,40% menjadi 4,10%.Se dangkan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) mengalami penurunan dari 81, 47% menjadi 71,87%. ³¹

³¹Laporan Rasio Keuangan tanggal 31 Desember 2016 dan 31 Desember 2017, Laporan Keuangan PT Bank Syariah.

d. Rasio Keuangan Tanggal 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017

LAPORAN RASIO KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2018 dan 2017			
No.	Rasio	31 Des 2018	31 Des 2017
Rasio Kinerja			
1.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	29,72%	20,29%
2.	Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	5,57%	4,02%
3.	Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	4,13%	4,37%
4.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	1,57%	2,04%
5.	NPF <i>gross</i>	6,73%	6,43%
6.	NPF <i>net</i>	4,97%	4,72%
7.	<i>Return On Assets</i> (ROA)	0,43%	0,51%
8.	<i>Return On Equity</i> (ROE)	2,49%	4,10%
9.	<i>Net Imbalan</i> (NI)	5,36%	5,84%
10.	<i>Net Operating Margin</i> (NOM)	-0,27%	-0,12%
11.	Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,32%	95,24%
12.	Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan	37,48%	33,85%
13.	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	75,49%	71,87%
Kepatuhan (Compliance)			
1.	a. Persentase Pelanggaran BMPD		
	1. Pihak Terkait	-	-
	2. Pihak Tidak Terkait	-	-
	b. Persentase Pelampauan BMPD		
	1. Pihak Terkait	-	-
	2. Pihak Tidak Terkait	-	-
2.	GWM		
	a. GWM Rupiah	5,37%	7,03%
	b. GWM valuta asing	1,87%	1,70%
3.	Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan	0,93%	0,34%

Tabel 3.5 Laporan Rasio Keuangan, Laporan Keuangan PT Bank Syariah Tbk Periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018&2017.³²

³²Laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d .31 Desember 2018 dan 2017.

Data laporan keuangan BRI Syariah periode 1 Januari s.d 1 Januari s.d 31 Desember 2017 dan 2018, NPF *gross* mengalami peningkatan yaitu 6,43% menjadi 6,73%. NPF *net* juga mengalami penibgkatan dari 4,72% menjadi 4,97%. Sedangkan *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan yaitu 0,51% menjadi 0,43%. Sedangkan *Return On Equity* (ROE) juga mengalami penurunan dari 4,10% menjadi 2,49%.

Pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan mengalami peningkatan yaitu 33, 85% menjadi 37,48%. Sedangkan *Financing to Deposit Rasio* (FDR) mengalami peningkatan dari 71,87% menjadi 75,49%.³³

C. Implementasi Akad Mudharabah *Linkage Program* pada BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang

1) Implementasi Akad Mudharabah pada KSPPS BMT BUS Lasem

Selain menggunakan akad mudharabah dengan bank umum syariah dalam *berlinkage program*, BMT juga menggunakan akad mudharabah dalam melaksanakan pembiayaan dengan nasabah-nasabahnya. *Outstanding* yang dikeluarkan pada pembiayaan mudharabah terbilang paling banyak di antara *outstanding* pada pembiayaan jenis lain (bisa dilihat pada tabel sebaran pembiayaan BMT BUS Lasem).

³³Laporan Rasio Keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2018, Laporan Keuangan PT Bank Syariah.

Berdasarkan wawancara kepada Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS, diperoleh info bahwa pembiayaan yang dilakukan BMT BUS dengan nasabahnya sebagian besar adalah menggunakan pembiayaan mudharabah karena melihat dari segi manfaatnya. Akad mudharabah lebih digemari masyarakat (*end user*) untuk usaha ketimbang menggunakan pembiayaan yang lain.

Bisa dilihat pada periode dua terakhir yaitu 2017 dan 2018, *outstanding* pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan secara signifikan yakni tercatat 323.220.692.819 pada tahun 2017 meningkat menjadi 452.817.757.268 pada tahun 2018.³⁴

Profit atau dalam artian pendapatan yang dihasilkan BMT dari pembiayaan mudharabah pun mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 yakni 70.034.300.950 menjadi 99.237.071.328.³⁵

2) Pelaksanaan Akad Mudharabah pada BRI Syariah Cabang Semarang.

BRI Syariah cabang Semarang memilih BMT BUS Lasem menjadi mudharib akad mudharabah *linkage program* dengan alasan³⁶: a) Kapabilitas (kemampuan) BMT BUS dalam

³⁴Lihat sebaran pembiayaan BMT BUS Lasem.

³⁵Lihat sebaran pembiayaan BMT BUS Lasem.

³⁶Hasil wawancara dengan Muis Hidayat (*Accounting Officer* BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 19 Juli 2019.

mengelola keuangan cukup baik b) BMT BUS mendorong nasabahnya sebagai mitra kerja dan ladang dakwah perkembangan ekonomi syariah c) Laporan keuangan yang cukup mumpuni (bagus) d) Manajemen yang cukup modal di bidangnya (profesioanl).

BRI Syariah cabang Semarang menggunakan akad mudharabah *linkage program* dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) karena pembiayaan ini adalah ditujukan kepada nasabahnya, jadi BMT BUS membutuhkan modal untuk menyalurkan pembiayaan tersebut ke nasabah dengan mengajukan pembiayaan ke BRIS. Sejak tahun 2013 (6 tahun) BMT BUS Lasem tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran kepada BRI Syariah.³⁷

Lembaga BRI Syariah cabang Semarang merasa tidak dirugikan secara profit atau pembayaran BMT BUS cukup menguntungkan dan jelas pembayarannya. Sebab, keuntungan yang didapat adalah hasil angsuran atau pembayaran dari *end user* (nasabah BMT BUS).

³⁷Hasil wawancara dengan Muis Hidayat (*Accounting Officer* BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 19 Juli 2019.

BAB IV

ANALISA PROFITABILITAS AKAD MUDHARABAH *LINKAGE* PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DENGAN BANK UMUM SYARIAH (BUS)

**(Studi Kasus pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan
BRI Syariah Cabang Semarang)”**

A. Implementasi akad mudharabah pada BMT BUS Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang.

Akad mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dengan pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.¹ Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan, yakni kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Sebab, pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.²

Penerapan akad mudharabah dalam lembaga keuangan maupun bank yaitu lembaga keuangan atau bank sebagai

¹Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2014), 128.

²Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, 128.

shahibul maal sedangkan nasabah sebagai mudharib atau sebaliknya yakni lembaga keuangan sebagai pengelola dana (*mudharib*) dari dana yang terhimpun dari para nasabah. Pada lembaga keuangan atau bank, tidak ada pembatasan baginya untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.³ Sehingga akad mudharabah dalam lembaga keuangan menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Para ahli ekonomi, dalam bahasa Inggris menyebut mudharabah mutlaqah dengan *Unrestricted Investment Account* (URIA).⁴

1. Implementasi akad mudharabah linkage program pada KSPPS BMT BUS Lasem.

Berdasarkan wawancara kepada Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, Koperasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil* Bina Ummat Sejahtera (KSPPS-BMT BUS), diperoleh info bahwa pembiayaan yang dilakukan BMT BUS dengan nasabahnya sebagian besar adalah menggunakan pembiayaan mudharabah karena melihat dari segi manfaatnya.⁵

Implementasi akad mudharabah pada BMT BUS yaitu BMT BUS sebagai *shahibul maal* sedangkan nasabah sebagai mudharib atau sebaliknya yakni lembaga keuangan sebagai

³Muhamad, “*Manajemen Dana Bank*”, 31.

⁴Huda, Nurul, dkk. “*Lembaga Keuangan Islam*”, 77.

⁵Hasil wawancara dengan narasumber Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS Lasem) pada Senin, 14 Januari 2019.

pengelola dana (*mudharib*) dari dana yang terhimpun dari para nasabah

Akad mudharabah lebih digemari masyarakat (*end user*) untuk usaha ketimbang menggunakan pembiayaan yang lain. Sistem yang digunakan sebagaimana aturan akad mudharabah yang ditetapkan pemerintah.⁶

Outstanding yang dikeluarkan BMT pada pembiayaan mudharabah terbilang paling banyak di antara *outstanding* pada pembiayaan jenis lain (bisa dilihat pada tabel sebaran pembiayaan BMT BUS Lasem). Bisa dilihat pada periode dua terahir yaitu 2017 dan 2018, *outstanding* pembiayaan mudharabah mengalami peningkatan secara signifikan yakni tercatat 323.220.692.819 pada tahun 2017 meningkat menjadi 452.817.757.268 pada tahun 2018. Profit atau pendapatan yang dihasilkan BMT dari pembiayaan mudharabah pun mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke 2018 yakni 70.034.300.950 menjadi 99.237.071.328.⁷

BMT BUS juga bekerja sama dengan bank umum syariaah (BUS), yaitu dengan menggunakan akad mudharabah

⁶Hasil wawancara dengan narasumber Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS) pada Senin, 14 Januari 2019.

⁷Sebaran pembiayaan KSPPS BMT BUS Lasem 2017 dan 2018.

linkage program, lebih tepatnya *linkage program* jenis *executing*.⁸ Dalam ha

l ini, BMT BUS menjadi pengelola dana (*mudharib*) dari dana yang diluncurkan BRI Syariah. Selain dengan BRI Syariah, BMT BUS juga menjadi *mudharib linkage program* dari beberapa bank umum syariah dan lembaga pemerintah.

Sesuai pada laporan keuangan KSPPS BMT BUS Lasem 2017, tercatat bahwa kewajiban jangka panjang yang berarti hutang dana dari beberapa bank umum syariah yaitu Panin Bank Syariah sebesar 3.404.031.054, BNI Syariah 66.650.303.436, Dana LPDB sebesar 3.888.860.000, DKI Syariah 10.000.000.000, Bank Jateng Syariah 38.109.211.323, Bank Jabar Banten Syariah 12.488.141.056, BRI Syariah sebesar 9.272.764.052, dan Bahana Artha Ventura senilai 10.000.000.000.⁹

Pada laporan keuangan tahun 2018, tercatat bahwa kewajiban jangka panjang yang berarti hutang dana dari beberapa bank umum syariah yaitu BNI Syariah sebesar 73.460.053.236, Bank DKI Syariah 6.666.666.664, Bank Jateng Syariah sebanyak 57.129.332.850, Bank Jabar Banten Syariah 15.630.188.910, BRI Syariah sebanyak 10.213.638.979, Bahana

⁸*Linkage program* yaitu program kerjasama antara bank umum termasuk bank umum peserta kredit usaha rakyat (KUR) dengan koperasi dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

⁹Laporan keuangan tahunan BMT BUS tahun 2017.

Artha Ventura 36.363.931.501, Bank Muamalat Indonesia 7.748.936.442.¹⁰

Berdasarkan laporan keuangan BMT BUS 2018, tercatat bahwa BMT BUS telah menjadi *mudharib* dari beberapa Bank Umum Syariah yakni BNI Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BRI Syariah, Bank DKI Syariah, dan dua lembaga pemerintah yaitu Bahana Artha Ventura (BAV) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).¹¹

2. Implementasi akad mudharabah *linkage program* pada BRI Syariah cabang Semarang.

BRI Syariah cabang Semarang memilih BMT BUS Lasem menjadi *mudharib* akad mudharabah *linkage program* dengan alasan: a) Kapabilitas (kemampuan) BMT BUS dalam mengelola keuangan cukup baik b) BMT BUS mendorong nasabahnya sebagai mitra kerja dan ladang dakwah perkembangan ekonomi syariah c) Laporan keuangan yang cukup mumpuni (bagus) d) Manajemen yang cukup modal di bidangnya (profesioanl).

BRI Syariah cabang Semarang menggunakan akad mudharabah *linkage program* dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) karena pembiayaan ini ditujukan kepada nasabahnya (*end user*), jadi BMT BUS membutuhkan modal

¹⁰Laporan Keuangan BMT BUS Lasem tahun 2018.

¹¹Hasil wawancara dengan narasumber Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS) pada Senin, 14 Januari 2019.

untuk menyalurkan pembiayaan tersebut ke nasabah dengan mengajukan pembiayaan ke BRIS. Sejak tahun 2013 (6 tahun) BMT BUS Lasem tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran kepada BRI Syariah.¹² BRI Syariah cabang Semarang dan BMT BUS Lasem menjalankan pembiayaan mudharabah sesuai ketentuan akad mudharabah yang ditetapkan pemerintah.

Bagi lembaga BRI Syariah cabang Semarang, pembayaran yang dilakukan BMT BUS Lasem cukup jelas dan menguntungkan. Menguntungkan bagi bank umum syariah (BRI Syariah) maupun lembaga keuangan mikro syariah (BMT BUS Lasem). Sebab, keuntungan yang didapat adalah hasil angsuran atau pembayaran dari *end user* (nasabah BMT BUS).

B. Profitabilitas akad mudharabah *linkage program* lembaga keuangan mikro syariah dengan bank umum syariah (BMT BUS Lasem dan BRI Syariah)

Setiap perusahaan pasti mengharapkan keuntungan atau profit, termasuk lembaga keuangan. Secara operasional, profit merupakan perbedaan antara pendapatan yang direalisasi yang timbul dari transaksi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut.¹³

¹²Hasil wawancara dengan Muis Hidayat (*Accounting Officer* BRI Syariah cabang Semarang) pada Jum'at, 19 Juli 2019.

¹³<http://repository.usu.ac.id>

Senada dengannya, Nafarin menyatakan profit adalah kelebihan penghasilan di atas biaya selama satu periode akuntasnsi.¹⁴ Profit atau pendapatan dicantumkan dalam laporan keuangan yang biasanya diterbitkan satu tahun sekali di bulan terakhir.

Bank umum syariah maupun lembaga keuangan merupakan lembaga yang tentunya mengharapkan profit, meskipun dengan label syariah. Iapun harus dikelola dengan baik. Berkaitan dengan tata kelola, pasal 34 ayat (1) UU Perbankan Syariah menentukan bahwa Perbankan Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Prinsip-prinsip tersebut mempertegas ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.8/14/PBI/20116 tentang Perubahan atas PBI No.8 /4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *good corporate governance* bagi Bank Umum. Pasal 1 angka 6 dari PBI No.8/14/PBI/2006 menjelaskan bahwa “*good corporate governance* adalah tata kelola bank, termasuk bank syariah, yang menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*),

¹⁴M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 788.

(*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), indenpendensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).¹⁵

1. Profitabilitas akad mudharabah *linkage program* pada BMT BUS Lasem (Lembaga Keuangan Mikro Syariah)

Berdasarkan data sebaran pembiayaan perproduk KSPPS BMT BUS Lasem per Desember 2017 dan Desember 2018, *outstanding* untuk jenis produk mudharabah yang dikeluarkan paling banyak di antara produk-produk pembiayaan lainnya (murabahah atau piutang lainnya). *Outstanding* yang dikeluarkan BMT BUS Lasem pada 2017 sejumlah Rp.323.220.692.819,00 meningkat menjadi Rp.452.817.757.268,00 di tahun 2018. Perkembangan yang cukup baik dan signifikan.

Semakin banyak *outstanding* yang dikeluarkan juga semakin meningkatkan pendapatan, terbukti pendapatan operasional dari pembiayaan mudharabah semakin meningkat setiap tahunnya dan merupakan pendapatan paling banyak dibanding dari pendapatan operasional pembiayaan yang lain (murabahah dan bai' bitsaman ajil). Pada tahun 2017 pendapatan operasional yang diperoleh dari pembiayaan mudharabah adalah yang paling tinggi dan selalu mengalami peningkatan. Dari tahun

¹⁵Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 112.

2017 ke 2018 mengalami peningkatan dari Rp.70.034.300.950, 00 menjadi Rp.99.237.071.328, 00.¹⁶

Non Performing financing (NPF)¹⁷ mengalami penurunan yaitu 2,32% menjadi 2,25%. Ini menandakan kondisi lembaga semakin membaik karena pembiayaan bermasalah mengalami penurunan. Tentunya akan meningkatkan pendapatan ataupun laba.

KSPPS BMT BUS Lasem terlihat baik dalam menjalankan pembiayaan mudharabah atas profit atau pendapatan yang semakin naik dengan adanya pembiayaan mudharabah yang dilakukan kepada *end user*.

Di sisi lain, KSSPS BMT BUS Lasem sebagai *mudharib* dari beberapa bank umum syariah yang menjalankan *linkage program* akad mudharabah dengannya. Dengan adanya *linkage program* tersebut justru menambah keuntungan bagi BMT BUS Lasem, karena dia bisa mengeluarkan *outstanding* dalam jumlah banyak. Di samping untuk memenuhi kebutuhan nasabah (*end user*) yang semakin membludak di masyarakat, meningkatkan keuntungan lembaga di samping memang untuk memenuhi kebutuhan *end user* yang semakin hari semakin membludak.

¹⁶Lihat laporan sebaran pembiayaan per produk KSPPS BMT BUS Lasem di halaman lampiran.

¹⁷NPF (*Non Performing financing*) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan.

Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS Lasem) mengatakan bahwa Pada *executing*, BMT BUS ber*linkage program* dengan 6 Bank Umum Syariah yaitu: BRI Syariah, BNI Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Jabar Banten Syariah (BJBS), Bank DKI Syariah, dan Bank Muamalat.

Keenam bank umum syariah tersebut menggunakan *linkage program* akad mudharabah dengan BMT BUS kecuali bank Muamalat. Serta dengan dua lembaga pemerintah yaitu Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan Bahana Artha Ventura (BAV).¹⁸

Dapat ditarik kesimpulan bahwa akad mudharabah menjadi program unggulan BMT BUS (lembaga keuangan mikro syariah) dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah (*end user*) dan mampu meningkatkan pendapatan. Dana yang ia dapatkan dari *linkage program* akad mudharabah dengan beberapa bank umum syariah termasuk BRI Syariah mampu meningkatkan keuntungan lembaganya karena mendorong lembaga mampu mengeluarkan *outstanding* yang banyak sesuai yang dibutuhkan nasabah (*end user*), yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan lembaga keuangan mikro syariah.

¹⁸Hasil wawancara dengan narasumber Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS Lasem) pada Senin, 14 Januari 2019.

2. Profitabilitas akad mudharabah *linkage program* pada BRI Syariah (Bank Umum Syariah)

a. Analisis ROA

Untuk melihat kemampuan manajemen kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dengan memanfaatkan asset yang dimiliki, maka perlu melihat ROA pada laporan keuangan. Semakin besar ROA, maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset atau semakin baik bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya.¹⁹

Berdasarkan data laporan keuangan BRI Syariah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 dan 2017, *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan yaitu 0,95% menjadi 0.51%.²⁰ Ternyata, pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan pun mengalami penurunan yaitu 36,96% menjadi 33,85%. Ini menunjukkan pembiayaan bagi hasil tidak meningkat sehingga keuntungan bank juga tidak meningkat.

¹⁹Yoga Tantular Rachman dan Ahmad Apandi, Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Return On Assets* (ROA), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013), *Proceedings ICIEF'15*(2015): 1508, diakses pada 17 September 2019.

²⁰Lihat laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d .31 Desember 2017 dan 2016.

Pada tahun berikutnya, ROA *Return on Asset* (ROA) mengalami penurunan lagi yaitu 0,51% menjadi 0,43%.²¹ Namun pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan mengalami peningkatan yaitu 33,85% menjadi 37,48%.

Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan yang dicapai bank dan semakin baik posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset atau semakin baik bank syariah dalam menyalurkan pembiayaannya. Faktanya, data laporan keuangan bank BRI Syariah Tbk. menunjukkan ROA pada rentang 3 waktu terakhir (2016-2018) berturut-turut mengalami penurunan. Sehingga itu menunjukkan tingkat keuntungan dan posisi bank sedang kurang baik dalam menggunakan asset atau menyalurkan pembiayaan.

b. Analisis NPF

Non Performing financing (NPF) adalah suatu keadaan di mana nasabah sudah tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. *Non Performing Finance* atau pembiayaan

²¹Lihat laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d .31 Desember 2018 dan 2017.

bermasalah²² atau dalam bank konvensional biasa disebut dengan *Non Performing Loan* (NPL).²³

Dari tahun 2016 ke 2017, NPF mengalami peningkatan baik NPF *gross* maupun NPF *net* yaitu NPF *gross* meningkat dari 4,57% menjadi 6,43% dan NPF *net* meningkat dari 3,19% menjadi 4,72%.²⁴

Pada tahun berikutnya NPF juga tetap mengalami peningkatan. Berdasarkan data laporan keuangan BRI Syariah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 dan 2018, NPF *gross* mengalami peningkatan yaitu 6,43% menjadi 6,73%. NPF *net* juga mengalami peningkatan dari 4,72% menjadi 4,97%.²⁵

Berdasarkan rentang waktu selama 3 tahun terhitung 2016, 2017, dan 2018, NPF (pembiayaan bermasalah) pada BRI Syariah selalu mengalami peningkatan. Ini menunjukkan keadaan bank sedang tidak baik dalam urusan pembiayaan. Jika

²²Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian.

²³NPL yaitu uatn pembiayaan yang mengalami masalah dalam pengembaliannya bisa dikarenakan faktor eksternal pihak nasabah maupun internal dari bank itu sendiri (Siamat, 2005).

²⁴Lihat laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d .31 Desember 2017 dan 2016.

²⁵Lihat laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, Laporan Keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d .31 Desember 2018 dan 2017.

tidak ditangani dengan baik, maka pembiayaan bermasalah merupakan sumber kerugian yang sangat potensi bagi bank.

c. Analisis FDR

Financing to Deposit ratio (FDR) merupakan rasio yang menggambarkan tingkat kemampuan bank syariah dalam mengembalikan dana kepada pihak ketiga melalui keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan *Mudharabah*. Indikator untuk mengetahui likuid atau tidaknya sebuah bank dapat dilihat dari rasio FDR bank tersebut.²⁶

FDR sebenarnya sama dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR)²⁷ dalam bank konvensional, perbedaan penyebutan ini dikarenakan dalam bank syariah tidak ada yang namanya *loan* atau pinjaman melainkan disebut dengan *financing* atau pembiayaan. Bank dikatakan likuid ketika mampu memenuhi semua kewajiban hutangnya dan memenuhi permintaan kebutuhan dana yang diajukan nasabah tanpa adanya penanguhan dalam pemberian dana melalui pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank

²⁶Yoga Tantular Rachman dan Ahmad Apandi, “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR)”, 1506.

²⁷*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak. Tetapi semakin tinggi rasio ini mempengaruhi likuiditas bank karena nantinya bank tidak memiliki cukup cadangan dana untuk memenuhi permintaan kebutuhan dana masyarakat.

Kemampuan menjalankan fungsi intermediasi secara baik, dapat digunakan rasio FDR sebagai indikatornya. Semakin tinggi rasio FDR maka bank tersebut semakin baik dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Semakin tinggi FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga semakin meningkat. Demikian sebaliknya, jika terjadi penurunan FDR maka pembiayaan yang disalurkan juga mengalami penurunan, sehingga FDR juga berpengaruh positif terhadap pembiayaan *Mudharabah*.²⁸

Pada laporan keuangan Berdasarkan data laporan keuangan BRI Syariah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2016 dan 2017, *Financing to Deposit Rasio* (FDR) mengalami

²⁸Yoga Tantular Rachman dan Ahmad Apandi, “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR)”, 1506-1507.

penurunan dari 81, 47% menjadi 71,87%.²⁹ Bahkan turun hingga 71, 87% yang berarti di bawah ketentuan Bank Indonesia mengenai batas minimal FDR yaitu 75%.

Namun pada tahun berikutnya FDR mengalami peningkatan dari 71, 87% menjadi 75, 49%.³⁰ Cukup baik mengalami peningkatan meskipun pada batas minimal ketentuan Bank Indonesia.

Bisa dilihat dari data laporan rasio keuangan pada rentang tahun 2016, 2017, 2018 FDR mengalami fluktuasi, itu menandakan pembiayaan *mudharabah* yang digunakan juga mengalami fluktuasi, tidak selalu banyak atau sedikit, atau bertambah setiap tahunnya.

d. Analisis pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan.

Laporan rasio keuangan 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016 menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke 2017 dengan sistem bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*. Yaitu 36, 96% menjadi 33,85 %. Namun pada tahun berikutnya pembiayaan bagi hasil terhadap total

²⁹Lihat rasio laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, laporan keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d 31 Desember 2017 dan 2016.

³⁰Lihat rasio laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, laporan keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d 31 Desember 2018 dan 2017.

pembiayaan mengalami peningkatan yaitu 33, 85% menjadi 37,48%.³¹

Jika dilihat dari perubahan total pembiayaan bagi hasil terhadap total pembiayaan memang fluktuatif. Selain itu, ini belum bisa dijadikan patokan untuk melihat peran akad mudharabah karena bagi hasil yang dimaksud tidak hanya mudharabah namun juga musyarakah.

e. Analisi pendapatan penyaluran dana

Pada laporan keuangan PT Bank BRI Syariah pada laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lainnya periode 1 Januari s.d 31 Desember 2017 dan 2016, tepatnya pada bagian pendapatan penyaluran dana menunjukkan bahwa pendapatan dari bagi hasil mudharabah dari tahun 2016 ke 2017 mengalami penurunan yaitu 167, 105 menjadi 141, 919 juta rupiah. Pada tahun berikutnya (2018) juga mengalami penurunan yaitu dari 141, 919 juta rupiah menjadi 84, 102 juta rupiah.

Berdasarkan data pada laporan keuangan tersebut jelas terlihat bahwa akad mudharabah tidak memberikan peran yang signifikan pada keuntungan atau pendapatan yang didapat lembaga bank BRI Syariah. Berbeda dengan pembiayaan bagi

³¹Lihat rasio laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, laporan keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d 31 Desember 2018 dan 2017.

hasil yang lain misal musyarakah justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan.³²

Berdasarkan data laporan keuangan, pendapatan yang diperoleh bank dari pendapatan bagi hasil mudharabah mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini jelas menunjukkan akad mudharabah tidak memberikan peran yang signifikan pada profit atau keuntungan lembaga BRI Syariah.

Pada laporan rasio keuangan pun dijelaskan bahwa NPF mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun³³, ini menunjukkan bank sedang tidak sehat dalam melakukan pembiayaannya. Meskipun di sisi lain, ROA sempat mengalami kenaikan namun itu tidak hanya disebabkan oleh pendapatan dari penyaluran dana akad mudharabah, namun juga karena pendapatan penyaluran dana yang lain maupun pendapatan operasional lainnya.

Menurunnya keuntungan yang didapat dari penggunaan akad mudharabah dijelaskan lebih lanjut pada rasio NPF (pembiayaan bermasalah) yang selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jelas itu berpengaruh pada

³²Lihat laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lainnya pada laporan keuangan PT Bank BRI syariah periode 1 Januari s.d 31 Desember 2018 dan 2017.

³³Lihat bab 3 hal. 92-95.

keuntungan yang didapat dari penggunaan pembiayaan akad mudharabah.

Selanjutnya dijelaskan lebih detail oleh rasio FDR yang mengalami perubahan cukup fluktuatif dari tahun 2016 ke 2018. Sempat mengalami penurunan yang signifikan dari tahun 2016 ke 2017 (9,6%) bahkan turunnya hingga FDR menjadi di bawah batas ketentuan minimal FDR oleh Bank Indonesia yaitu menurun dari 81,47% menjadi 71,87%.³⁴

Pada tahun berikutnya mengalami peningkatan dan memenuhi batas minimal FDR yang ditentukan Bank Indonesia (2017 ke 2018), namun itu hanya sedikit persen (3,62%) yaitu 71,87% menjadi 75,49%³⁵. FDR pun hanya 0,49 lebih baik dari batas ketentuan FDR minimal yang ditentukan bank Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan data, uraian dan analisa peneliti, akad mudharabah tidak mampu memberikan peran yang signifikan pada keuntungan yang diperoleh bank BRI syariah.

³⁴Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank Indonesia bahwa rasio FDR minimal 75% dan tidak boleh melebihi 110 %. Dengan rasio FDR diantara tingkatan tersebut menandakan bahwa bank syariah menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Baiknya bank mampu menjaga nilai FDR hanya diantara 80% hingga 90%. Dengan FDR 100% atau 110% menandakan bank mampu menyalurkan dana melebihi batas dana pihak ketiga (DPK) yang dimiliki, dengan begitu tingkat perolehan keuntungan atau bagi hasil yang diterima bank akan semakin banyak.

³⁵Lihat rasio keuangan Lihat rasio laporan rasio keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, laporan keuangan PT Bank BRI Syariah Tbk periode laporan 1 Januari s.d 31 Desember 2018 dan 2017.

Meskipun berdasarkan wawancara pada salah satu *Account Officer* BRI Syariah Cabang Semarang, BRI Syariah Cabang Semarang dikatakan lebih memilih menggunakan akad mudharabah *linkage program executing*. Dengan alasan profit atau pembayarannya cukup menguntungkan dan jelas pembayarannya, selain untuk ladang dakwah perkembangan ekonomi syariah.³⁶ Namun, ternyata itu hanya anggapan posirif atau fenomena yang dialami bang Syariah Cabang Semarang yang belum bisa mewakili BRI Syariah secara keseluruhan.

³⁶Hasil wawancara dengan narasumber Aries Dwi Cahyono (Kepala divisi operasional dan IT, BMT BUS Lasem) pada Senin, 14 Januari 2019.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa tentang “Profitabilitas Akad Mudharabah *Linkage Program* Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dengan Bank Umum Syariah (Bus) (Studi Kasus Pada BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Lasem dan BRI Syariah Cabang Semarang)”, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Implementasi akad mudharabah *linkage program* pada BMT BUS Lasem yaitu BMT BUS Lasem menjadi *mudharib* dari lima bank umum syariah yaitu BNI Syariah, Bank Jateng Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, BRI Syariah, Bank DKI Syariah, dan dua lembaga pemerintah yaitu Bahana Artha Ventura (BAV) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB). Di sisi lain, BMT BUS menggunakan akad mudharabah dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah (*end user*). Pembiayaan mudharabah yang digunakan adalah mutlaqah karena tidak ada pembatasan bagi lembaga keuangan (BMT BUS Lasem) untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.

Sedangkan implementasi akad mudharabah *linkage program* pada BRI Syariah yaitu BRI Syariah cabang Semarang bersama BMT BUS Lasem menjalankan *linkage program* mudharabah sesuai ketentuan akad mudharabah yang ditetapkan

pemerintah. BRI Syariah lebih memilih menggunakan akad mudharabah dengan lembaga keuangan mikro syariah karena dana akan tertuju pada nasabah (*end user*) yang tepat dan sebagai ladang dakwah ekonomi syariah.

- 2) Profitabilitas akad mudharabah *linkage program* terhadap lembaga keuangan syariah khususnya BMT BUS sangat baik, akad mudharabah menjadi program unggulan BMT BUS (lembaga keuangan mikro syariah) dalam melakukan pembiayaan kepada nasabah (*end user*). Dana yang ia dapatkan dari *linkage program* akad mudharabah dengan beberapa bank umum syariah termasuk BRI Syariah mampu meningkatkan keuntungan lembaganya karena mendorongnya sanggup mengeluarkan *outstanding* yang lebih banyak sesuai yang dibutuhkan nasabah (*end user*), yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan lembaga keuangan mikro syariah.

Sedangkan profitabilitas akad mudharabh *linkage program* pada BRI Syariah (bank umum syariah) yaitu *linkage program* akad mudharabah tidak memberikan peran yang signifikan pada keuntungan atau pendapatan yang didapat lembaga bank BRI Syariah. Berbeda dengan pembiayaan bagi hasil yang lain misal musyarakah justru mampu meningkatkan pendapatan atau profit yang cukup signifikan.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mencoba memberikan beberapa saran, antara lain:

- a. Bagi lembaga keuangan syariah terutama BMT BUS Lasem dan bank umum syariah terutama BRI Syariah, tingkatkan manajemen pengelolaan dalam menggunakan akad mudharabah *linkage program* sehingga profit lembaga meningkat.
- b. Bagi kaum akademisi, teruskan perkaya ilmu tentang ekonomi syariah tak hanya teorinya saja namun juga pelaksanaannya, termasuk ilmu tentang akad mudharabah *linkage program*
- c. Bagi peneliti selanjutnya jika mengkaji akad mudharabah *linkage program*, alangkah lebih baik mengkaji dengan lebih detail terkait hitung-hitungan keuntungan, nisbah bagi hasil, atau semacamnya, tidak hanya secara global seperti yang telah penulis lakukan. Penulis merasa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan karena kesempurnaan hanya milik-Nya. Jadi, akan lebih baik jikalau ada yang melakukan penelitian lanjutan terkait hal-hal yang belum mampu peneliti sentuh karena keterbatasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam-Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Anshori, Abdul Ghofur *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Arifian, Johan, "Hubungan Hukum Kemitraan dalam *Linkage Program* Perbankan Syariah" *Jurnal Economica*" Volume IV, Edisi 2 (2013), diakses 22 Mei 2018.
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group, 2011.
- Fachrudin, Fachri, *Kajian Teori Laba Pada Transaksi Jual Beli Dalam Fiqh Mu'āmalah (Studi Komparasi Teori Laba Ekonomi Konvensional)*, Ad-Deenar Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Fatoni, Nur, "Penguatan Akad Pembiayaan Mudharabah untuk Merealisasikan Misi Keadilan Berbisnis pada Baitut Tamwil Tamzis Wonosobo", *Jurnal Economica*, Vo.2, Edisi 2, Nopember 2012.

- Hamidah, Siti, “Analisis Kebijakan *Linkage Program* Lembaga Keuangan Syariah” *Jurnal Arena Hukum Volume 8, Nomor 2* (2015), diakses 22 Mei 2018.
- Hasanah, Nur Ayu “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil (*Al-Mudharabah*) pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pontianak”, Tesis, Universitas Diponegoro, 2005.
- Hasan., Zubairi. *Undang Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Current Issues Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Huda, Nurul, dkk. *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Pranada Media Grup, 2012.
- Isnaini, Atin Meriati, “Kedudukan Hukum Baitul Mal wat tamwil (BMT) sebagai Lembaga Keuangan Bukan Bank dengan Sistem Syariah”, *Jurnal Hukum Jatiswara*, Fakultas Hukum Universitas Mataram.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kuswadi, *Meningkatkan Laba Melalui Pendekatan Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Biaya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2005.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah-Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Pranada Media Group, 2012.
- Mi’raj, Denizar Abdurrahman, “Linkage Program Bank Syariah Dengan Bmt:Tinjauan Kritis Bagi Pengembangan Sistem Keuangan Islam Yang Lebih Kaffah” *Jurnal ESTT Vol. 2 No. 10 (2015)*: 852, diakses 22 Mei 2018.

- Muhamad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Muhamad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Nafarin, M. *Penganggaran Perusahaan Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Nawan, Hadari dan M. Martini. *Instrumen Penelitian bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Pedoman Umum *Linkage Program* Antara Bank Umum Dengan Koperasi. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. No. 03/Per/M.KUKM/III/2009.
- Rachman, Yoga Tantular dan Ahmad Apandi, *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR), Non Performing Financing (NPF), Return On Assets (ROA), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah (Survey pada Bank Syariah yang Listing di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2009-2013), Proceedings ICIEF'15*, diakses pada 17 September 2019.

- Sударsono, Heri, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Ekonisia*, Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Triuwono, Iwan. *Akuntansi Syariah Perspektif, metodologi, dan Teori*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Vogel, Frank E dan Samuel L. Hayes, III, *Hukum Keuangan Islam-Konsep, Teori, dan Praktek*, terj. Sobirin Asnawi, Siwi Purwandari, dan Waluyati Handayani. Bandung: Nusamedia, 2007.
- Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam: Perspektif Aplikatfi*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- ¹<http://repo.iain-tulungagung.ac.id> (Teori Keuntungan/Laba)”.
<http://profilbmtbus.blogspot.co.id>
<http://repository.usu.ac.id>

LAMPIRAN

a. Laporan Keuangan BMT BUS 2017

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BINA UMMAH SELAMAT LASEM
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA
Per 31 DESEMBER 2017

Bekas Pembiayaan	Rp 70.034.300,560
Margin	Rp 26.980.380,082
Pendapatan Asli	Rp 3.955.416,474
Pendapatan Lain-lain	Rp 2.798.452,250
Total Pendapatan	Rp 103.588.569,716

Bekas Simp. Lancar	Rp 10.104.541,920
Bekas Simp. Berjangka	Rp 26.243.679,381
Bekas Simp. Siswa Pendidikan	Rp 4.370.374,376
Bekas Kumpulan Lain	Rp 17.800.832,819
Bekas Tenaga Kerja	Rp 28.115.600,000
Bekas Beban Dana	Rp 1.141.174,050
Bekas Beban Dana	Rp 27.121.554,132
Bekas Beban Dana	Rp 681.614,514
Bekas Beban Dana	Rp 377.600,189
Bekas ATK	Rp 7.371,900
Bekas Administrasi	Rp 701.908,596
Bekas Listrik	Rp 152.983,337
Bekas Foto Copy	Rp 14.140,000
Bekas Rumanh Tenaga Kantor	Rp 789.351,250
Bekas Beban Amortisasi BOD	Rp 789.351,250
Bekas Beban Amortisasi	Rp 710.432,353
Bekas Beban Amortisasi	Rp 1.249.491,658
Bekas Beban Amortisasi	Rp 483.080,760
Bekas Beban Amortisasi	Rp 508.844,368
Bekas Beban Amortisasi	Rp 722.918,897
Bekas Beban Amortisasi	Rp 1.141.174,050
Bekas Beban Amortisasi	Rp 27.121,554
Bekas Beban Amortisasi	Rp 37.902,151,824
Bekas Beban Amortisasi	Rp 5.766,407,882
Bekas Beban Amortisasi	Rp 2.049.071,976
Bekas Beban Amortisasi	Rp 3.747.335,916
Total Beban Operasional	Rp 671.331.698,759

SHU setelah pajak Rp 3.747.335,916

KOPERASI SIMPAN PINJAM PEMBIAYAAN SYARIAH
BINA UMMAH SELAMAT LASEM
LAPORAN NERACA
Per 31 DESEMBER 2017

AKTIVA	PASIVA
Aktiva Lancar	Kewajiban Lancar
Kas dan setara kas	Simp. Lancar
Rp 14.453.432,587	Rp 205.254.905,603
Bank	Simp. Pendidikan
Rp 3.991.570,474	Rp 37.984.115,782
BOD - bersih	Simp. Risiko Pembiayaan
Rp 1.175.250,000	Rp 3.464.044,376
Total Aktiva Lancar	Total Pasiva Lancar
Rp 19.120.253,041	Rp 220.454.744,678
Investasi Jk. Panjang	Simp. Lainnya
Simp. Pd. Koperasi	Rp 1.088.860,208
Simp. Tok. Pd. Kop.	Rp 1.178.397,375
Rp 4.821.500,000	Rp 1.531.985,695
Total Aktiva Panjang	Dana-dana bagian SHU
Rp 11.580.720,000	Rp 451.948.043,685
Total Aktiva	Total Pasiva
Rp 30.701.000,000	Rp 671.331.698,759
Aktiva Produktif	Kewajiban Jk. Panjang
Pendapatan dan piutang	Modal-Pada Kerja
Rp 586.463,527	Rp 1.224.446,816
Piutang Lain	BNI Syariah
Rp 10.982.872,529	Rp 3.424.031,054
Penyisihan, PTT /PPAP	Dana LPDB
Rp 14.118.278,459	Rp 3.888.860,000
Total Aktiva Produktif	Dana LPDB
Rp 592.327,751,577	Rp 10.000.000,000
Aktiva Tetap	Dana LPDB
Tanah	Rp 38.109.411,323
Bangunan	Rp 12.488.141,056
Rp 19.566.453,750	BRI Syariah
Perabotan	Rp 9.272.764,052
Rp 5.503.454,000	Rp 10.000.000,000
Peralatan	Banana Artha Ventura
Rp 10.982.872,529	Rp 130.647.959,539
Akum. Penyisl. AT	Total Aktiva Tetap
Rp 27.386.337,141	Rp 130.647.959,539
Total Aktiva Tetap	Total Pasiva
Rp 30.701.000,000	Rp 671.331.698,759
Aktiva Lain-lain	Modal
Rp 16.095.167,000	Simp. Pokok
Total Aktiva Lain-lain	Simp. Wajib
Rp 16.095.167,000	Simp. Pokok Khusus
Total Aktiva	Cadangan
Rp 30.701.000,000	Tambahan Modal disetor
Aktiva Lain-lain	Rp 11.228.138,356
Rp 16.095.167,000	Pendapatan Asli
Total Aktiva Lain-lain	SHU Jmlahan
Rp 16.095.167,000	Rp 3.747.335,916
Total Aktiva	Total Pasiva
Rp 30.701.000,000	Rp 671.331.698,759

KOPERASI SIMPAN PINJAM PERBAYAAN SYARIAH
BINA UMMAT SEJAHTERA
LAPORAN PERKARAAN KEUANGAN
Per 31 DESEMBER 2018

Bekas Pinjaman	Rp. 99.237.021,328	Rp. 12.751.497,871	
Bekas Pinjaman	Rp. 28.272.224,254	Rp. 27.869.822,010	
Bekas Bank /Acp	Rp. 519.322.506	Rp. 5.301.669,750	
Bekas Pinjaman	Rp. 4.000.000,000	Rp. 28.488.326,619	
Pinjaman Adm	Rp. 61.833.937	Rp. 64.844.564,963	
Pinjaman Adm	Rp. 61.833.937	Rp. 396.346,397	
Total Pendapatan	Rp. 133.633.673,997	Rp. 816.633.708	
Bekas Simp. Lancar	Rp. 12.751.497,871	Rp. 717.625,208	
Bekas Simp. Lancar	Rp. 27.869.822,010	Rp. 25.793.000,000	
Bekas Simp. Simpanan	Rp. 5.301.669,750	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman	Rp. 28.488.326,619	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 64.844.564,963	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 396.346,397	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman	Rp. 816.633.708	Rp. 423.704.450	
Bekas ATK	Rp. 717.625,208	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Kuran	Rp. 25.793.000,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Foto Copy	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Runtas, Tengg. Kantor	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Amortisasi BLOD	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Penunfas	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Penunfas	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.000,000	Rp. 214.690.554	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 214.690.554	Rp. 76.982,963	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 76.982,963	Rp. 1.229.488,006	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.229.488,006	Rp. 423.704.450	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 423.704.450	Rp. 1.098.413,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 1.098.413,000	Rp. 734.000,000	
Bekas Pinjaman Lain	Rp. 734.0		

c. Daftar Pertanyaan

Hari dan Tanggal Penelitian :

Nara Sumber :

1. Bagaimana penerapan akad *mudharabah linkage program* Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera (BMT BUS) dengan Bank Umum Syariah (BUS)?
2. Bagaimana BMT BUS menjalankan tugas sebagai *shahibul mal* pada nasabahnya sekaligus sebagai *mudharib* dari Bank Umum Syariah?
3. Bagaimana peran akad mudharabah pada *linkage program* terhadap profit lembaga BMT BUS Lasem?
4. Bagaimana perbedaan akad mudharabah pada pembiayaan biasa dan pada *linkage program* BMT BUS dengan bank umum syariah?
5. Mengapa BMT BUS menggunakan Akad mudharabah linkage program

@Data tambahan:

Profil BMT BUS :

Struktural BMT BUS :

Data Nasabah dan bank umum yang menggunakan linkage program dengan BMT BUS: :

Hari dan Tanggal Penelitian :


Nara Sumber :

1. Mengapa BRI Syariah cabang Semarang memilih BMT BUS Lasem menjadi mudharib akad mudharabah *linkage program*?
2. Mengapa BRI Syariah cabang Semarang menggunakan akad mudharabah *linkage program* dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)?
3. Sejak kapan BRI Syariah ber*linkage program* menggunakan akad mudharabah dengan BMT BUS Lasem? (Berapa lama)
4. Bagaimana peran akad mudharabah pada *linkage program* terhadap profit lembaga BRI Syariah cabang Semarang?
5. Bagaimana perbedaan akad mudharabah pada pembiayaan biasa dan pada *linkage program* dengan LKMS?

@Data:

1. Profil BRI Syariah cabang Semarang
2. Struktural kepengurusan BRI Syariah cabang Semarang
BRI Syariah cabang Semarang
3. Data NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Deposit Rasio*)
4. Data keuangan *linkage program* akad mudharabah
5. Data LKMS yang menggunakan *linkage program* dengan BRI Syariah cabang Semarang

d. Surat-Surat



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA**
 Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
 Jl. Untung Suropati No.16 Lasem Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263
 e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmtbus.co.id

Nomor : 286/KSPPS BMT/BUSN/2018 Lasem, 26 Mei 2018
 Lamp : -
 Hal : Tanggapan Pra Riset

Yth. DEKAN UIN WALISONGO SEMARANG
 di
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga segala aktifitas yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT. Amin.

Berkenaan dengan surat dari UIN WALISONGO SEMARANG, No: 1213/Un.10.5/D1/TL.00/05/2018, tanggal 14 Mei 2018, perihal tersebut pada pokok surat, maka pada dasarnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa UIN WALISONGO SEMARANG dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Mahasiswa	Nim	Program/Smt	Tempat Penelitian
1	Faiqotun Ni'mah	1600108010	S.2/IV	Divisi Bisnis Pusat


untuk melaksanakan Pra Riset di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Tanggal 14 Mei 2018 s/d Selesai.

dengan ketentuan :

1. Informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan lembaga.
2. Karena lembaga kami lembaga keuangan yang memiliki intensitas dan frekuensi kerja cukup tinggi, maka selama melakukan Pra Riset yang bersangkutan harus dapat memahami dan memaklumi kondisi kerja di lembaga kami.
3. Untuk kerapihan peserta Pra Riset diwajibkan memakai baju putih lengan panjang dan bawahan (rok / celana) berwarna hitam.
4. Sebelum melaksanakan Penelitian diharapkan menemui Kepala Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat dengan alamat Jl. Untung Suropati no.16 Lasem Telp. 0295-532376

Demikian surat tanggapan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera
 Arif Mustofa
 Kadiv. Humas Capital

- e. Wawancara dengan pihak BRI Syariah cabang Semarang



- f. Wawancara dengan pihak BMT BUS Lasem.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faiqotun Ni'mah
TTL : Rembang, 19 September 1994
Alamat : Desa Jurang Jero RT. 06/RW.02
Kec. Sluke Kab. Rembang

***Nama Orang Tua**

Ayah : Muhammad Maskut
Ibu : Siti Maemunah
No. Hp : 085225242042
Email : fai.nimahfaniluxgmail.com

***Daftar Riwayat Pendidikan**

a. Pendidikan Formal

1. TK Rahayu, Sluke-Rembang. Lulus Tahun 2000.
2. Sekolah Dasar Negeri Trahan 1, Sluke-Rembang. Lulus Tahun 2006.
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri Sluke, Sluke Rembang. Lulus Tahun 2009.
4. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lasem, Lasem-Rembang. Lulus Tahun 2012.
5. Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Prodi Tafsir dan Hadits Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Lulus Tahun 2016.

b. Pendidikan Non Formal

1. Madrasah Diniyah Mansya'ul Huda, Sluke-Rembang. Lulus Tahun 2007.
2. Ponpes (Pondok Pesantren) Al-Hamidiyyah, Lasem-Rembang. Tahun 2011.
3. Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Sluke. Tahun 2008.
4. Pelatihan Menjahit yang dipelopori beberapa dosen UIN Walisongo Semarang. Tahun 2013.

***Pengalaman Sosial Kemasyarakatan**

Menjadi Peserta Program Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP) angkatan X (2019) di Desa Pinggan Kecamatan Bulu oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng.